



**PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGANGGURAN, DAN
KEMISKINAN
(Studi Pada Kota dan Kabupaten di Propinsi D. I. Yogyakarta
dan Jawa Tengah Periode 2005 – 2009)**



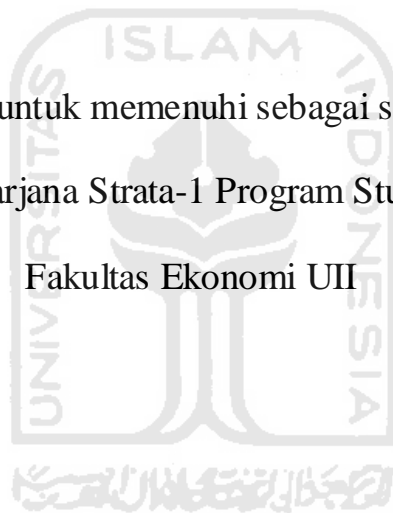
Oleh
Nama : Shandy Rahadiyan Prathama
No. Mahasiswa : 06312152
Jurusan : Akuntansi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2012**

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGANGGURAN, DAN
KEMISKINAN**
(Studi Pada Kota dan Kabupaten di Propinsi D. I. Yogyakarta
dan Jawa Tengah Periode 2005 – 2009)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada
Fakultas Ekonomi UII



Oleh:

Nama : Shandy Rahadiyan Prathama
No. Mahasiswa : 06312152
Jurusan : Akuntansi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2012

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 09 Nov 2011

Penyusun



(Shandy Rahadiyan Prathama)

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGANGGURAN, DAN
KEMISKINAN
(Studi Pada Kota dan Kabupaten di Propinsi D. I. Yogyakarta dan
Jawa Tengah Periode 2005 – 2009)**



Pada tanggal 29-12-2011

Dosen pembimbing

M. Umke Suji
Mahmudi, SE, M.Si, Ak

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi,
Pengangguran dan Kemiskinan**

Disusun Oleh: SHANDY RAHADIYAN PRATHAMA
Nomor Mahasiswa: 06312152

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 15 Februari 2012

Penguji/Pemb. Skripsi

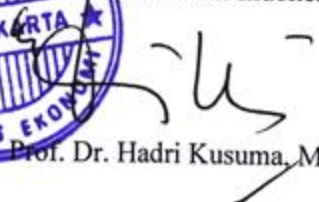
: Mahmudi, SE, M.Si, Ak

Penguji I

: Dra. Erna Hidayah, M.Si, Ak



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia


Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

MOTTO

“Ilmu pengetahuan adalah sayap yang sanggup menerbangkan kita kepada keinginan kita” (Abdullah masrun M.h).

“Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat , kecuali orang-orang yang khusyu”

(QS. Al Baqarah 45).

“Setiap tantangan selalu mengandung resiko, resiko selalu punya hikmah bagi kehidupan selanjutnya” (Marie curie).

“Anda tidak harus kaya untuk mencapai potensi Anda”

(Barrack Obama-United States President)

PERSEMBAHAN

Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Allah Swt, karena atas hidayahnya akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi saya ini dengan berbagai macam pengalaman dan pembelajaran hidup yang tidak ternilai selama dalam proses pengerjaan skripsi ini dan selama kuliah saya. Kemudian saya persembahkan skripsi saya ini kepada:

1. Almarhum ayah saya Ir. Kusmaryanto , Now I'm like you dad , I hope you happy see this.
2. Ibu saya Ny. Jatininghsih dan Bude saya Ny.Siti Ismani, terima kasih atas dukungan doa, financial, dan ijin yang selalu diberikan.
3. Calon pendamping hidup saya dan keluarga Om Mujiono, sekarang sudah lunas ya salah satu target dan tujuan hidup saya.
4. Teman-teman seperjuangan yang banyak sekali, tidak mungkin bisa saya sebutkan satu-persatu.
5. Semua mantan karyawan saya, semua bisnis saya, semua rekanan saya, semua tamu/client saya mulai dari yang domestik hingga Foreigner , thanks for your support and experience for me.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia, rahmat, ridho, rizki serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan”

Skripsi ini diajukan sebagai syarat dalam menempuh jalur skripsi Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini, segala upaya telah penulis lakukan untuk tercapainya kesempurnaan tulisan ini. Penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, khususnya pada:

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA selaku Dekan Fakultas Ekonom Universitas Islam Indonesia.
2. Yth. Bapak Mahmudi, SE., M.Si. selaku Dosen Pembimbing skripsi atas kemurahannya berbagi ilmu, kesabarannya dalam membimbing serta masukannya dalam membimbing skripsi.
3. Seluruh staf / karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia atas keramahannya yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di kampus FE UII.
4. Seluruh staf / karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia atas kerjasamanya dalam memberikan pelayanan yang terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan.
5. Keluarga besar saya yang selama ini telah memberikan perhatian, dukungan dan semangat.

6. Teman-teman seperjuangan yang sudah lulus maupun belum terimakasih atas supportnya.
7. Calon teman hidupku yang ngomel-ngomel terus agar cepat lulus, terimakasih omelannya, omelanmu semangatkan.
8. Dan bagi semua pihak yang telah membantuku yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapat imbalan di sisi Allah SWT sebagai amal ibadah, Amin. Mengingat keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka penulis mengharapkan pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang dapat mengembangkan penelitian selanjutnya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mohon maaf atas kekurangan tersebut. Sekiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 09 Nov 2011
Penulis,

Shandy Rahadiyan Prathama

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pengesahan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xii
Daftar Lampiran	xiii
Abstrak	xiv
BAB I	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Sistematika Penelitian	9
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	11
2.1. Kinerja Keuangan	11
2.2. Analisis Rasio Keuangan Sebagai Ukuran Kinerja	24
2.3. Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengangguran	32

2.4. Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan	34
2.5. Tinjauan Penelitian Terdahulu	34
2.6. Kerangka Berpikir	38
2.7. Pengembangan Hipotesis Penelitian	39
BAB III. METODE PENELITIAN	46
3.1. Populasi dan Sampel Penelitian	46
3.2. Teknik Pengambilan Sampel	48
3.3. Jenis dan Sumber Data	49
3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian ...	49
3.5. Metode Analisi Data	53
BAB IV. ANALISI DATA DAN PEMBAHASAN	62
4.1. Analisis Deskriptif	63
4.2. Analisis Statistik	65
4.2.1. Uji Keباikan Model	66
4.2.2. Hasil Pengujian Hipotesis	68
4.2.2.1. Pengaruh Likuiditas terhadap Pertumbuhan Ekonomi ...	69
4.2.2.2. Pengaruh Solvabilitas terhadap Pertumbuhan Ekonomi ...	71
4.2.2.3. Pengaruh Leverage terhadap Pertumbuhan Ekonomi ...	72
4.2.2.4. Pengaruh Aktifitas terhadap Pertumbuhan Ekonomi ...	73
4.2.2.5. Pengaruh Kemandirian terhadap Pertumbuhan Ekonomi ...	73
4.2.2.6. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran .	75
4.2.2.7. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan	76

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	78
5.1. Kesimpulan	78
5.2. Keterbatasan penelitian	79
5.3. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81



DAFTAR TABEL

Gambar 1 Kerangka Berpikir Penelitian	38
3.1. Daftar Kota dan Kabupaten	47
3.2. Kriteria Penerimaan Suatu Model	56
4.1. Statistik Diskriptif	63
4.2. Goodness of Fit Index	66
Gambar 4.1 Hasil diagram jalur output Amos	68
4.3. Estimasi hasil analisis SEM	69



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Hasil Descriptive Statistics	85
Hasil Amos	86
Data Prosentase Penduduk Miskin Kab/Kota Provinsi DIY & JATENG (%) .	95
Data Prosentase Pengangguran Kab/Kota Provinsi DIY & JATENG (%).....	96
Data Laju Pertumbuhan PDRB Kab/Kota Provinsi DIY & JATENG (%)	97
Data Rasio Solvabilitas, Rasio Leverage, Rasio Likuiditas, Rasio Aktivitas, - Rasio Kemandirian	98



ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi analisis Kinerja Keuangan berupa Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Leverage, Rasio Aktivitas dan Rasio Kemandirian terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi terhadap pengangguran dan kemiskinan. Objek penelitian ini adalah Kota/Kabupaten yang ada di Propinsi D.I Yogyakarta. Data penelitian adalah laporan APBD beserta realisasinya, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan berturut-turut untuk tahun 2005-2009, dan PDRB pada harga konstan 2000 menurut kabupaten/kota tahun 2005-2009. Data penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis diskriptif untuk memberikan gambaran awal tentang Rasio Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan kemudian pengujian hipotesis menggunakan SEM (Structural Equation Models). Hasil penelitian membuktikan bahwa Rasio likuiditas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio solvabilitas tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio leverage tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio aktivitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap pengangguran. Tetapi pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan.

*Kata Kunci: kinerja keuangan, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran
Jateng -Diy*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pengelolaan pemerintah daerah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten dan kota memasuki era baru. Dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut memberikan Pemerintah Daerah kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dilakukan berdasarkan ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/ MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Republik Indonesia merupakan landasan dikeluarkannya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Dengan bergulirnya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah, dan aturan pelaksanaannya, pemerintah mengeluarkan UU RI Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan selain hanya mengandalkan bantuan dan bagian dari Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah diharapkan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat daerah sehingga pemerintah perlu melakukan penjarangan aspirasi masyarakat untuk mengidentifikasi perkembangan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Penjarangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam proses keuangan daerah. Pemberian otonomi dan desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mengukur kemandirian daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Pengukuran kinerja pada organisasi bisnis (organisasi yang berorientasi laba) berbeda dengan organisasi sektor publik (organisasi yang tidak berorientasi laba). Organisasi sektor bisnis dalam mengukur kinerjanya bisa hanya dengan melihat tingkat labanya sedangkan organisasi sektor publik lebih sulit karena dibutuhkan lebih dari satu variabel untuk mengukurnya. Sehingga tidaklah mudah melakukan pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik seperti pemerintah. Menurut Mardiasmo (2002) kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan

upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau output yang ditetapkan (PP No. 58 Tahun 2005). Pemerintah dapat mengetahui hasil yang dicapai selama satu tahun anggaran apabila APBD disusun berdasarkan sasaran tertentu dengan pendekatan kinerja sehingga dapat dinilai apakah pemerintah daerah berhasil atau tidak dalam menjalankan tugasnya.

Pengukuran kinerja juga dapat dilakukan dengan membuat analisis rasio-rasio keuangan yang mengacu pada APBD pada tahun anggaran tertentu. Rasio-rasio keuangan ini selanjutnya dibandingkan antar tahun untuk melihat kemajuan yang dicapai pemerintah daerah. Namun sampai saat ini, secara konseptual belum ada kesepakatan mengenai nama dan jenis rasio keuangan apa saja yang dapat digunakan sebagai dasar menilai kinerja Pemerintah Daerah dengan acuan APBD.

Beberapa rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain yaitu Rasio Kemandirian, yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat; Rasio Efektivitas, yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah; Rasio Efisiensi, yaitu perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima; Rasio Aktivitas, yaitu kemampuan pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja

pembangunan secara optimal; Rasio DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*), dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana di daerah, selain menggunakan Pendapatan Asli daerah, pemerintah dapat menggunakan sumber dana lain yaitu dengan melakukan pinjaman sehingga rasio ini diperlukan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kembali pinjaman daerah; Rasio Pertumbuhan, yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya serius (pemerintah) dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung (investasi). Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan Adi (2006) menunjukkan terjadi disparitas pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antar daerah (kabupaten dan kota) dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Nanga (2005) mengindikasikan terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah dan bisa jadi hal ini mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk di kembangkan menjadi sumber PAD. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah – daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001). Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor – sektor yang produktif di daerah.

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi (Mardiasmo, 2002). Tujuan organisasi khususnya organisasi sektor publik antara lain adalah meningkatkan pelayanan. Prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik adalah aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran. Dalam pelaksanaan desentralisasi, sumber-sumber pengeluaran Pemerintah Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, pemerintah memberikan dana perimbangan dan salah satu komponen dana ini yang memberikan kontribusi terbesar adalah Dana Alokasi Umum (2005). Dalam beberapa tahun berjalan,

proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Adi, 2006). Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat ini. Namun demikian, dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus menjadi semakin kecil. Berbagai investasi yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan memberikan hasil positif yang tercermin dalam peningkatan PAD.

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Brata (2004) menyatakan bahwa terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Kedua komponen tersebut adalah PAD dan Bagian Sumbangan & Bantuan. Namun demikian, penelitian Brata (2004) belum mencakup periode setelah otonomi daerah sehingga hubungan PAD dan Pertumbuhan ekonomi dapat saja mengarah ke hubungan negatif jika daerah terlalu ofensif dalam upaya peningkatan penerimaan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan menggunakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB/PDRB), namun demikian indikator ini dianggap tidak selalu tepat dikarenakan tidak mencerminkan makna pertumbuhan yang sebenarnya. Indikator lain, yaitu pendapatan per kapita dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi ini (Kuncoro, 2004). Indikator ini lebih komprehensif dalam

mengukur pertumbuhan ekonomi dikarenakan lebih menekankan pada kemampuan negara atau daerah untuk meningkatkan PDB/PDRB agar dapat melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Indikator ini secara simultan menunjukkan apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi mampu meningkatkan kesejahteraan seiring dengan semakin cepatnya laju penambahan penduduk.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang diteliti selanjutnya dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah rasio Likuiditas, Solvabilitas, Leverage, Aktivitas, dan Kemandirian berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengangguran?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh rasio Likuiditas, Solvabilitas, Leverage, Aktivitas, dan Kemandirian terhadap Pertumbuhan Ekonomi
2. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran
3. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Penulis untuk menerapkan ilmu akuntansi yang didapat dibangku kuliah dengan kehidupan nyata dilapangan.
2. Para mahasiswa lain sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap Pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan.
3. Bagi kalangan akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori akuntansi publik dan sebagai referensi perpustakaan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab yaitu,

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan titik tolak penulisan skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan dan pembahasan secara rinci landasan teori yang meliputi landasan teori, hasil penelitian terdahulu, dan model empiris.

BAB III METODE PENELITIAN

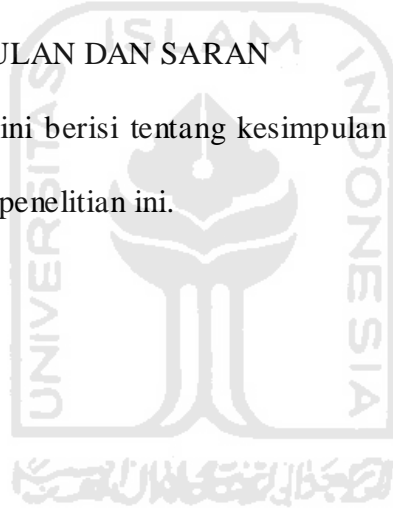
Pada bab ini berisi tentang populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, sumber data, variabel penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menganalisis dan membahas masalah yang diteliti mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap Pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kinerja Keuangan

a. Pengertian Kinerja

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan /program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (Bastian, 2002).

Menurut Larry D Stout, dalam Bastian (2001) menyatakan bahwa:

Pengukuran/penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (mission accomplishment) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses.

Oleh karena itu, organisasi pada dasarnya dioperasikan oleh sumber daya manusia, sehingga penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan di dalam organisasi.

Menurut James B. Whittaker dalam Bastian (2001) pengukuran/penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Menurut Mardiasmo (2002) pengukuran kinerja sektor publik dapat dilakukan untuk memenuhi tiga maksud yaitu :

- 1) Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah yaitu dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik.
- 2) Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Berdasarkan ketentuan ayat (1) pasal 45 Undang-undang tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran. Selanjutnya pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 108 tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, menegaskan bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah. Berikut penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur renstra (rencana strategik).

Penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur renstra didasarkan pada indikator :

1. Masukan (*input*): bagaimana tingkat atau besaran sumber-sumber yang digunakan seperti: SDM, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
2. Keluaran (*output*): bagaimana bentuk produk yang dihasilkan langsung oleh kebijakan atau program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
3. Hasil (*outcome*): bagaimana tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan keluaran (*output*) kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan.
4. Manfaat (*benefit*): bagaimana kemanfaatan yang dapat dilaksanakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat maupun pemerintah.
5. Dampak (*impact*): bagaimana dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai berdasarkan manfaat yang dihasilkan.

b. Kinerja Keuangan

1. Pengertian Analisis Kinerja Keuangan

Di dalam kamus umum bahasa Indonesia, *kinerja* diartikan sebagai suatu yang dicapai, prestasi kerja yang terlihat, kemampuan kerja (Zain, 1994: 697). Yang dimaksud dengan kinerja keuangan

berdasar acuan di atas adalah kemampuan kerja manajemen dalam hal ini manajemen keuangan dalam mencapai prestasi kerja.

2. Alat Analisis Kinerja Keuangan

a. Rasio Likuiditas

Rasio ini menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Suatu perusahaan yang memiliki kekuatan sedemikian besarnya sehingga mampu memenuhi segala kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi dikatakan bahwa perusahaan tersebut adalah likuid, sebaliknya yang tidak memiliki kemampuan membayar kewajibannya adalah illikuid.

Untuk menilai posisi keuangan jangka pendek (likuiditas) digunakan alat untuk menganalisis dan menginterpretasikan data tersebut, terdiri dari :

1) *Current Ratio*

Current Ratio adalah ratio antara aktiva lancar dengan hutang lancar. *Current ratio* ini menunjukkan tingkat keamanan (*margin of safety*) kreditur jangka pendek, atau kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang tersebut. Secara kasar dapat dikatakan bahwa bagi perusahaan yang bukan perusahaan kredit, bahwa *current ratio* kurang dari 2:1 dianggap kurang baik sebab apabila aktiva lancar turun

misalnya sampai lebih dari 50% maka jumlah aktiva lancarnya tidak akan cukup lagi untuk menutup hutang lancarnya. Pedoman *current ratio* 2:1 sebenarnya hanya didasarkan pada prinsip hati-hati. Dengan demikian pedoman *current ratio* 200% bukanlah pedoman yang mutlak.

Perhitungan *current ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100 \%$$

2) *Cash Ratio*

Cash Ratio adalah rasio yang membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas adalah efek atau surat berharga. Perhitungan *cash ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas + Efek}}{\text{Hutang lancar}} \times 100 \%$$

b. Rasio Solvabilitas

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.

Suatu perusahaan dikatakan *solvable* apabila perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk

membayar semua hutang-hutangnya, sebaliknya apabila jumlah aktiva tidak cukup atau lebih kecil daripada jumlah hutangnya, berarti perusahaan tersebut dalam keadaan *insolvable*.

Dalam hubungan antara likuiditas dan solvabilitas ada empat kemungkinan yang dapat dialami suatu perusahaan, yaitu (Riyanto, 1990: 25):

- a. Perusahaan yang likuid tetapi insolvabel.
- b. Perusahaan yang likuid dan solvabel.
- c. Perusahaan yang solvabel tetapi illikuid.
- d. Perusahaan yang insolvabel dan illikuid.

Semakin besar tingkat solvabilitas perusahaan, akan semakin besar jumlah hutang yang digunakan dan semakin besar resiko bisnis yang dihadapi terutama apabila kondisi perekonomian memburuk.

1) *Total Debt to Total Asset Ratio* (TDTA)

Rasio total hutang dengan total aktiva yang biasa disebut rasio hutang (*debt ratio*) mengukur prosentase besarnya dana yang berasal dari hutang. Total hutang mencakup baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang. Kreditur lebih menyukai rasio hutang yang rendah karena semakin rendah rasio ini, maka semakin besar perlindungan terhadap kerugian kreditur dalam peristiwa likuidasi. Di sisi lain, pemegang saham akan menginginkan solvabilitas yang lebih besar karena akan dapat

meningkatkan laba yang diharapkan. Semakin tinggi *debt ratio* menunjukkan perusahaan semakin beresiko. Untuk mengukur besarnya *debt ratio* dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Debt Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100 \%$$

2) *Debt to Equity Ratio* (DER)

Rasio hutang dengan modal sendiri (*debt to equity ratio*) merupakan imbalan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri semakin sedikit dibanding dengan hutangnya. Bagi perusahaan, sebaiknya besarnya hutang tidak boleh melebihi modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Untuk pendekatan konservatif besarnya hutang maksimal sama dengan modal sendiri, artinya *debt to equity*nya maksimal 100 %. Untuk menghitung *debt to equity ratio* digunakan rumus sebagai berikut

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100 \%$$

3) *Long Term Debt to Equity Ratio* (LTDER)

Rasio ini mengukur kontribusi relatif dari modal sendiri dan hutang jangka panjang dalam struktur permodalan perusahaan. Semakin besar proporsi hutang, berarti semakin

besar pula beban tetap yang ditanggung oleh perusahaan untuk bunga dan pembayaran kembali hutangnya dan semakin besar kemungkinan resiko perusahaan menjadi tidak solvabel dalam keadaan di mana terjadi penurunan laba dan atau lain-lain yang tidak diharapkan. Perhitungan *long term debt to equity ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Long Term Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Hutang Jangka Panjang}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100 \%$$

c. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas mengukur seberapa besar efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya. Rasio ini dinyatakan sebagai perbandingan penjualan dengan berbagai elemen aktiva. Elemen aktiva sebagai penggunaan dana seharusnya bisa dikendalikan agar bisa dimanfaatkan secara optimal. Semakin efektif dalam memanfaatkan dana semakin cepat perputaran dana tersebut, karena rasio aktivitas umumnya diukur dari perputaran masing-masing elemen aktiva.

1) Perputaran persediaan (*Inventory Turn Over/ ITO*)

Perputaran persediaan merupakan rasio antara jumlah harga pokok barang yang dijual dengan nilai rata-rata persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Turn over ini menunjukkan beberapa kali jumlah persediaan barang dagangan diganti dalam satu tahun. Tingkat perputaran

persediaan mengukur perusahaan dalam memutar barang dagangannya dan menunjukkan hubungan antara barang yang diperlukan untuk menunjang atau mengimbangi tingkat penjualan yang ditentukan. Semakin tinggi persediaan berputar semakin efektif perusahaan dalam mengelola persediaan. Perputaran persediaan (*inventori turn over*) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Perputaran Persediaan} = \frac{\text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Rata-rata Persediaan}}$$

2) *Total Asset Turn Over (TATO)*

Kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva berputar dalam suatu periode tertentu atau kemampuan modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan revenue. Rasio ini menghitung efektifitas penggunaan total aktiva. Rasio yang tinggi menunjukkan manajemen yang baik, sebaliknya rasio yang rendah membuat manajemen mengevaluasi strategi, pemasaran dan pengeluaran modalnya (investasi). Semakin besar perputaran aktiva semakin efektif perusahaan mengelola aktivanya. Perhitungan perputaran total aktiva dirumuskan sebagai berikut :

$$TATO = \frac{\text{Penjualan bersih}}{\text{Total Aktiva}}$$

d. Rasio Rentabilitas

Rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas merupakan kriteria penilaian yang secara luas dan dianggap paling valid untuk dipakai sebagai alat ukur tentang hasil pelaksanaan operasi perusahaan, karena mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Harnanto, 1984):

1. Rentabilitas merupakan alat pembanding, pada berbagai alternatif investasi atau penanaman modal (yang sudah barang tentu) sesuai dengan tingkat resikonya masing-masing. Secara umum dapat dikatakan semakin besar resiko suatu penanaman modal atau investasi dituntut rentabilitas yang semakin tinggi pula, demikian pula sebaliknya.
2. Rentabilitas mampu menggambarkan tingkat laba yang dihasilkan menurut jumlah modal yang ditanamkan atau investasinya karena rentabilitas dinyatakan dalam angka relatif (persentase).

Rasio rentabilitas dapat diukur dengan beberapa indikator yakni :

a. *Return on Investment* (ROI)

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Rasio ini menghubungkan keuntungan yang

diperoleh dari operasi perusahaan (*net operating income*) dengan jumlah investasi atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan operasi tersebut (*net operating asset*). Dalam garis besarnya *return on investment* merupakan perbandingan relatif antara “*laba*” dan “*jumlah investasi yang digunakan untuk merealisasikan laba tersebut*”. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak atau EAT. Perhitungan *return on investment* dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Return on Investment} = \frac{\text{EAT}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

b. *Return on Equity* (ROE)

Return on Equity sering disebut dengan *rate of return on net worth* yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki, sehingga ROE ini ada yang menyebutnya sebagai rentabilitas modal sendiri. Laba yang diperhitungkan adalah laba bersih setelah dipotong pajak atau EAT. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Rasio ROE bisa dihitung sebagai berikut :

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{EAT}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Meskipun rasio ini mengukur laba dari sudut pandang pemegang saham, rasio ini tidak memperhitungkan *dividen* maupun *capital gain* untuk pemegang saham. Karena itu rasio ini bukan pengukur *return* pemegang saham yang sebenarnya.

c. *Net Profit Margin*

Net Profit Margin merupakan persentase laba yang diperoleh dari tingkat penjualan melalui perbandingan antara laba setelah pajak dengan penjualan. Besar kecilnya *net profit margin* pada setiap transaksi penjualan ditentukan oleh penjualan bersih dan laba usaha. Besar kecilnya laba usaha tergantung pada pendapatan dari penjualan dan biaya usaha. Dengan jumlah biaya usaha tertentu *net profit margin* dapat diperbesar dengan memperbesar penjualan atau dengan jumlah penjualan tertentu *net profit margin* dapat diperbesar dengan menekan atau memperkecil biaya usahanya.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{EAT}}{\text{Penjualan bersih}} \times 100 \%$$

3. Elemen Pokok Pengukuran Kinerja

Elemen pokok suatu pengukuran kinerja antara lain (Mahsun, 2006) :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi.

Tujuan adalah pernyataan secara umum (belum secara eksplisit) tentang apa yang ingin dicapai organisasi. Sasaran merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batasan waktu yang jelas. Strategi adalah cara atau teknik yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

2. Merumuskan Indikator dan Ukuran Kinerja

Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi.

3. Mengukur Tingkat Ketercapaian Tujuan dan Sasaran-sasaran Organisasi

Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan.

4. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerimaan informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. Capaian kinerja organisasi dapat dinilai dengan skala pengukuran tertentu. Informasi capaian kinerja dapat dijadikan *feedback*, penilaian kemajuan organisasi dan dasar peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

2.2. Analisis Rasio Keuangan sebagai Ukuran Kinerja

Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Ukuran kinerja adalah suatu sistem yang digunakan untuk memonitor dua unsur penting dari hubungan input dan output. Untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dapat menggunakan berbagai macam ukuran yang berbeda untuk perencanaan, pengendalian dan pengukuran lainnya.

Hasil dari pengukuran kinerja akan membantu Pemerintah daerah dalam memastikan bahwa sumber-sumber yang telah dipakai secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan, ukuran kinerja tersebut dapat diklasifikasikan dalam ukuran finansial yaitu penggunaan analisis rasio keuangan pada APBD.

Analisis dalam pengelolaan keuangan daerah yang mencerminkan kinerja pemerintah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang

merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran. Salah satu tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan serta perencanaan untuk masa yang akan datang.

Menurut Widodo dalam Halim (2001) analisa rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain :

1. Rasio Kemandirian

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiscal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan

pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber ekstern. Semakin tinggi kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi (Halim, 2004).

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah di bagi dengan jumlah pendapatarn transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi keuangan daerahnya (Mahmudi, 2007).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{PAD}{\text{Transfer Pusat} + \text{Propinsi} + \text{Pinjaman}}$$

Secara konsepsional, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, walaupun akan menimbulkan perbedaan. Ada empat macam pola hubungan yang memperkenalkan “Hubungan Situasional”

yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, antara lain (Halim, 2004) :

- a. Pola Hubungan *Instruktif*, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. (Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b. Pola Hubungan *Konsultatif*, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
- c. Pola Hubungan *Partisipatif*, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemadiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- d. Pola Hubungan *Delegatif*, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2004).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan}}$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Halim, 2004).

3. Rasio Likuiditas

Kemampuan daerah dalam membayar utangnya merupakan ukuran dari ratio likuiditas, dimana dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika kemampuan daerah untuk memenuhi kewajibannya memadai maka daerah tersebut dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan fungsi pemenuhan kebutuhan perusahaannya atau daerah.

Rasio- rasio yang digunakan dalam rasio Likuiditas ada dua yaitu:

a) *Current Ratio*

Current Ratio yaitu membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki pemerintah daerah pada tanggal neraca dengan utang jangka pendek. Rasio lancar merupakan ukuran standar untuk menilai kesehatan keuangan organisasi, baik organisasi bisnis maupun pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang mencukupi untuk membayar utangnya (Mahmudi, 2007). Rumus yang digunakan:

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

Nilai *Current Ratio* yang meningkat menunjukkan kelebihan uang kas pada aktiva lancar, yang berpengaruh tidak baik pada

profitabilitas perusahaan. sedangkan nilai *current ratio* yang menurun menunjukkan risiko likuiditas yang meningkat.

b) *Quick Ratio*

Quick Ratio merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban- kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan. *Quick ratio* merupakan alat ukur likuiditas yang lebih baik jika persediaan tidak mudah diuangkan. Jika persediaan likuid, maka *quick ratio* merupakan ukuran likuiditas yang paling disukai. Rumus yang digunakan:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Current Assets} - \text{Inventory}}{\text{Current Liabilities}}$$

Likuiditas persediaan yang rendah dapat diakibatkan oleh 2 faktor yaitu:

- a. Terlalu banyak macam persediaan yang tidak dapat dijual dengan mudah karena merupakan barang setengah jadi, barang usang atau barang untuk kegunaan tertentu.
- b. Jika barang tersebut diatas dijual dengan kredit. maka akan menjadi piutang terlebih dahulu sebelum menjadi uang kas, Quick Ratio = 1 atau lebih besar dari 1 lebih direkomendasi. tetapi sama seperti current ratio. nilai yang diterima tergantung pada industrinya.

Nilai *quick ratio* yang meningkat menunjukkan kelebihan kas atau adanya *idle fund* yaitu dana yang tidak bermanfaat untuk menambah laba perusahaan, sedangkan nilai *quick ratio* yang menurun menunjukkan adanya investasi yang sangat besar dalam persediaan.

4. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2004).

Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini dapat diketahui porsi belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan (Mahmudi, 2007). Rasio aktivitas ini dirumuskan :

$$\text{Rasio Aktivitas (Belanja Modal)} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

5. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Rasio DSCR sangat diperlukan apabila pemerintah daerah berencana untuk mengadakan utang jangka panjang. DSCR merupakan rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kembali pinjaman daerah (Mahmudi, 2007).

Dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah, selain menggunakan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan alternatif sumber dana lain, yaitu dengan melakukan

pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan itu adalah (Halim, 2004) :

a. Ketentuan yang menyangkut persyaratan

1) Jumlah kumulatif pinjaman daerah yang wajib dibayar maksimal 75% dari penerimaan APBD tahun sebelumnya.

2) DCSR minimal 2,5

DSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagian Daerah (BD) dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan Sumber Daya Alam dan bagian daerah lainnya serta Dana Alokasi Umum setelah dikurangi Belanja Wajib (BW), dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. Rasio DSCR dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{Total (Pokok Angsuran + Bunga + Biaya Pinjaman)}$$

b. Ketentuan yang menyangkut penggunaan pinjaman

1) Pinjaman jangka panjang digunakan membiayai pembangunan yang dapat menghasilkan penerimaan kembali untuk pembayaran pinjaman dan pelayanan masyarakat.

2) Pinjaman jangka pendek untuk pengaturan arus kas.

c. Ketentuan yang menyangkut prosedur

1) Mendapat persetujuan DPRD

2) Dituangkan dalam kontrak

2.3. Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengangguran

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product (GDP)* atau *Gross National Product (GNP)* tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999). Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu negara dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak sehingga memungkinkan untuk kenaikan standar hidup yang mana berdampak pula bagi penurunan tingkat pengangguran dalam jangka panjang.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang sangat penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dan sekaligus berguna untuk menentukan arah pembangunan dimasa yang akan datang. PDRB juga secara tidak langsung merupakan salah satu indikator yang dapat dipergunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Pertumbuhan ekonomi daerah dari tahun

ketahun dapat dilihat melalui besarnya PDRB baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan.

Sedangkan PDRB dihitung dari nilai tambah yang dihasilkan dari sektor-sektor perekonomian daerah yakni:

1. Pertanian, perikanan dan kelautan
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri pengolahan
4. Listrik, gas dan air bersih
5. Konstruksi
6. Perdagangan, Hotel dan restoran
7. Angkutan dan komunikasi
8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
9. Jasa-jasa

Todaro (1997) secara spesifik menyebutkan ada tiga faktor atau komponen utama pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja yang dianggap secara positif merangsang pertumbuhan ekonomi.

Pengertian pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*) atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan

tetapi belum bekerja (Putong, 2003). Penelitian Arthur Okun dalam Putong (2003) mengatakan apabila GNP tumbuh sebesar 2,5% diatas trendnya yang telah dicapai pada tahun tertentu, maka tingkat pengangguran akan turun sebesar 1%. Jadi $1\%/2,5\% = 0,4\%$. Apabila tingkat pengangguran ingin diturunkan sebesar 2%, maka pertumbuhan ekonomi haruslah dipacu agar bisa tumbuh sebesar 5% di atas rata-rata.

2.4. Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan

Kemiskinan menurut Dinas Sosial DIY dan Jawa Tengah didefinisikan dari dua sisi, yaitu sisi ekonomi dan sosial. Dari sisi ekonomi yang berarti ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar, sedangkan dari sisi sosial yang berarti ketidakmampuan dalam peran sosial. Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan, baik yang relatif tetap maupun yang berkembang. Faktor relatif tetap misalnya letak geografis dan daya dukung alam. Faktor yang berkembang berupa keadaan sosial budaya yang menyangkut pengetahuan dan ketrampilan, adat istiadat, situasi politik dan kebijaksanaan penguasa. Ada beberapa indikator yang menyebabkan orang terperangkap kemiskinan, diantaranya perkembangan di bidang sosial dan ekonomi antara lain pelayanan kesehatan, gizi, pengajaran, perumahan, konsumsi, transportasi dan jasa, pertanian, industri dan perdagangan.

2.5. Tinjauan Penelitian Terdahulu

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian belanja modal. Variabel dependen penelitian ini adalah belanja modal, sedangkan variabel independennya adalah pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum. Obyek penelitian ini adalah pemerintah daerah se Jawa-Bali baik kabupaten dan kota dengan periode penelitian dari tahun 2004–2005. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) memiliki korelasi positif namun tidak signifikan terhadap variabel *belanja modal*. Variabel PAD memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap belanja modal. Variabel DAU memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap variabel belanja modal.
- b. Penelitian yang dilakukan Harianto dan Adi (2007) mengenai hubungan Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita, dengan mengambil obyek penelitian Kabupaten dan Kota se Jawa – Bali. Periode penelitian dari tahun 2001–2004. Alat analisis yang digunakan adalah SEM (*Structural equation Models*). Penelitian ini menemukan bahwa 1) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan Belanja Modal. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Halim dan Abdullah (2003) yang menyatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. 2) Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan

terhadap perubahan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Adi (2005) yang menyatakan bahwa Belanja pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 3) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan Pendapatan Per Kapita. Penelitian ini mendukung pernyataan BAPENAS (2003) yang menegaskan bahwa pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Hamzah (2008) mengenai analisis kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan: pendekatan analisis jalur, dengan obyek penelitian pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Propinsi DIY dan Jawa Tengah, dan mengambil periode penelitian pada tahun 2001–2006. Hasil penelitian ini menemukan bahwa 1) Kesenjangan kinerja keuangan berupa rasio kemandirian¹ dan rasio kemandirian² cukup besar, bahkan rasio efektifitas dan efisiensi dapat dikatakan besar sekali. Pada tingkat kemiskinan dan pengangguran juga mengalami kesenjangan yang cukup besar, sedangkan pada pertumbuhan ekonomi kesenjangan tidak terlalu besar. 2) Hasil pengujian secara langsung antara kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan rasio kemandirian¹, rasio kemandirian², dan rasio efisiensi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efektifitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk

pengujian pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran menunjukkan terdapat pengaruh secara positif, sedangkan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan terdapat pengaruh secara negatif. 3) Pada pengujian secara tidak langsung antara kinerja keuangan dengan pengangguran dan kemiskinan menunjukkan rasio kemandirian¹, rasio kemandirian², dan rasio efisiensi secara tidak langsung berpengaruh terhadap pengangguran dan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Harianto dan Adi (2007) dengan persamaan pada;

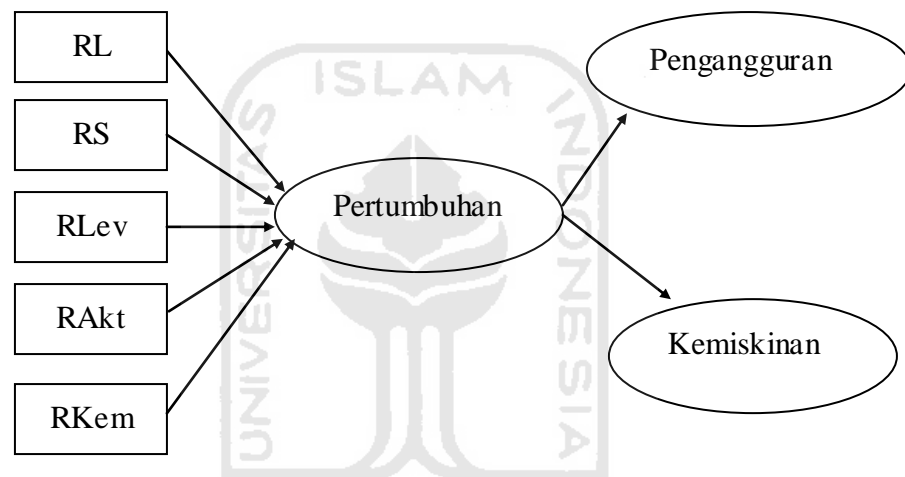
1. Variabel yang digunakan yaitu pada rasio keuangan
2. Alat Analisis yang digunakan adalah SEM.

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian Harianto dan Adi (2007) yaitu pada variabel penelitian, dimana Harianto dan Adi menggunakan variabel penelitian Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan perkapita. Sedangkan dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan. Jadi dalam penelitian ini tidak menggunakan variabel pendapatan perkapita dan diganti dengan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan. Sampel yang digunakan pada penelitian Harianto dan Adi sampelnya adalah kabupaten dan kota se Jawa-Bali baik dari tahun 2001 – 2004.

Sedangkan pada penelitian ini adalah kabupaten dan kota di D. I. Yogyakarta dan Jawa Tengah, dengan mengambil periode penelitian dari tahun 2005 – 2009.

2.6. Kerangka Berpikir

Model dalam penelitian secara komprehensif yang menggambarkan hubungan antar variabel adalah sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Berpikir Penelitian

Keterangan:

Variabel laten eksogen terhadap variabel endogen pertumbuhan adalah:

RL : Rasio Likuiditas

RS : Rasio Solvabilitas

RLev : Rasio Leverage

RAkt : Rasio Aktivitas

RKem : Rasio Kemandirian

Variabel laten eksogen terhadap variabel endogen kemiskinan dan pengangguran adalah: pertumbuhan ekonomi

2.7. Pengembangan Hipotesis Penelitian

a. Pengaruh Rasio Likuiditas Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, pengangguran dan kemiskinan.

Kemampuan daerah dalam membayar utangnya merupakan ukuran dari ratio likuiditas, dimana dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika kemampuan daerah untuk memenuhi kewajibannya memadai maka daerah tersebut dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan fungsi pemenuhan kebutuhan perusahaannya. Sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya yang semakin meningkat. Dengan meningkatnya kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu meningkatnya produktivitas masyarakat dan bertambahnya investor, karena pemerintah mampu untuk memenuhi semua belanjanya yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah dengan meningkatnya PAD maka akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Abimanyu, 2005).

Hipotesis yang dikembangkan dari pemaparan ini adalah sebagai berikut :

Hipotesis 1 (Ha1): Rasio Likuiditas berpengaruh positif terhadap
Pertumbuhan Ekonomi.

b. Pengaruh Rasio Solvabilitas dengan Pertumbuhan Ekonomi, pengangguran dan kemiskinan.

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat keamanan kreditur jangka panjang. Suatu daerah yang solvabel berarti bahwa daerah tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar utang-utangnya. Para kreditor jangka panjang atau investor selain berminat pada kondisi keuangan jangka pendek justru terutama berminat pada kondisi jangka panjang karena posisi jangka pendek betapa pun baiknya tidaklah selalu paralel dengan kondisi keuangan jangka panjang. Solvabilitas menunjukkan proporsi atas penggunaan uang sebagai modal untuk membiayai aktiva perusahaan yang berasal dari modal pemilik atau modal pinjaman.

Daerah dengan rasio utang yang relatif tinggi memiliki pengembalian yang lebih tinggi dalam situasi perekonomian normal, tetapi mereka menghadapi resiko kerugian ketika perekonomian berada dalam masa resesi. Dilihat dari rasio modal asing (pinjaman) dengan total belanja daerah, semakin tinggi rasio ini berarti semakin kecil modal sendiri yang digunakan untuk membiayai aktiva daerah. Dengan proporsi penggunaan utang (modal pinjaman) yang tepat maka belanja pemerintah daerah dapat dibiayai secara efisien sehingga dapat memaksimalkan nilai pendapatan asli daerah.

Jika PEMDA menetapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah

ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah (Saragih, 2003). Dalam penelitiannya Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal hal ini dapat ditunjukkan dengan solvabilitasnya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Adi (2006) membuktikan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu meningkatnya solvabilitas akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dari gambaran ini, dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut :

Hipotesis 2 (Ha2) : Rasio solvabilitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

c. Pengaruh rasio leverage terhadap Pertumbuhan Ekonomi, pengangguran dan kemiskinan.

Rasio leverage mengidentifikasi sumber modal daerah; pemilik atau kreditor luar. Istilah rasio *leverage* mengacu pada kenyataan bahwa menggunakan modal dengan beban bunga tetap (*fixed*) akan "memperbesar" kerugian dalam kaitannya dengan investor. Rasio yang paling banyak digunakan adalah hutang total (hutang lancar dan hutang jangka panjang) dibagi dengan jumlah ekuitas. Rasio ini merupakan ukuran dalam persentase dana total yang diperoleh dari pinjaman. Rasio hutang jangka panjang terhadap modal saham merupakan ukuran sejauh mana sumber pendanaan jangka panjang disediakan oleh kreditor.

Peningkatan sumber modal harus berdampak pada perekonomian daerah. Oleh karena itu, daerah tidak akan berhasil bila daerah tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan penerimaan PAD yang berasal dari belanja modal melalui investor. Bila yang terjadi sebaliknya, maka bisa diindikasikan adanya eksploitasi PAD terhadap masyarakat secara berlebihan tanpa memperhatikan peningkatan produktifitas masyarakat itu sendiri. Sidik (2002) menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan sumber modal hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah karena pertumbuhan ekonomi meningkat. Dari pemaparan ini dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Hipotesis 3 (Ha3) : Rasio leverage berpengaruh positif terhadap
Pertumbuhan Ekonomi.

d. Pengaruh Rasio Aktivitas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Rasio aktivitas menunjukkan seberapa efektif suatu daerah memanfaatkan sumber daya daerah. Dengan membandingkan pendapatan (*revenue*) dengan sumber daya untuk menghasilkannya, maka dapat ditetapkan efisiensi operasi. Rasio aktivitas membandingkan total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Penggunaan sumber

daya daerah yang efektif akan meningkatkan produktivitas masyarakat, hal ini dikarenakan peningkatan sumber daya daerah akan membuka terjadinya peluang usaha, sehingga mengakibatkan produktivitas menjadi meningkat. Peningkatan produktivitas akan meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi meningkat. Dari pemaparan ini dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Hipotesis 4 (Ha4) : Rasio Aktivitas berpengaruh positif terhadap
Pertumbuhan Ekonomi.

e. Pengaruh Rasio Kemandirian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya.

Kemandirian dan pengelolaan secara ekonomis, efektif, dan efisiensi suatu daerah atau wilayah akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Hal ini dikarenakan kurang atau tidak adanya intervensi dalam hal kebijakan terkait dengan pengelolaan daerah tersebut. Di samping itu, aparaturnya dapat secara inisiatif dan kreatif

dalam mengelola daerah untuk mendorong pertumbuhan daerah. Dari pemaparan ini dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Hipotesis 5 (Ha5) : Rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap
Pertumbuhan Ekonomi.

f. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengangguran.

Kurang atau tidak adanya intervensi dalam hal kebijakan terkait dengan pengelolaan daerah tersebut. Di samping itu, aparatur daerah dapat secara inisiatif dan kreatif dalam mengelola daerah untuk mendorong pertumbuhan daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran.

Penelitian Okun dalam Putong (2003) menemukan bahwa apabila GNP mengalami pertumbuhan di atas trendnya yang telah dicapai pada tahun tertentu, maka tingkat pengangguran akan turun. Dari pemaparan ini dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Hipotesis 6 (Ha6) : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif
terhadap pengangguran.

g. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan.

Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas, efisiensi, dan efektifitas pemerintah daerah.

Anggaran daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang, ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas di berbagai unit kerja. Anggaran sebagai instrumen kebijakan dan menduduki posisi sentral harus memuat kinerja, baik untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hamzah (2008) diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi selanjutnya pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Dari pemaparan ini dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Hipotesis 7 (Ha7) : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah objek atau subjek yang diteliti yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 1999: 72). Populasi dalam penelitian ini adalah semua kota dan kabupaten di pulau Jawa.

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto, 2002). Sampel dalam penelitian ini adalah 5 kota/kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten serta 33 kota/kabupaten di Propinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 6 kota dan 27 kabupaten dengan periode penelitian dari tahun 2005-2009 dengan alasan ketersediaan data.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber asli (Husein, 2001). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dinas atau instansi yang terkait, yaitu Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, BPS DIY dan Jawa Tengah serta situs-situs Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan.

Nama Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 3.1.
Daftar Kota dan Kabupaten

NO	<u>Prov. Jawa Tengah</u>	20	Kab. Purworejo
1	Kab. Banjarnegara	21	Kab. Semarang
2	Kab. Banyumas	22	Kab. Sragen
3	Kab. Batang	23	Kab. Sukoharjo
4	Kab. Blora	24	Kab. Tegal
5	Kab. Boyolali	25	Kab. Temanggung
6	Kab. Brebes	26	Kab. Wonogiri
7	Kab. Cilacap	27	Kab. Wonosobo
8	Kab. Demak	28	Kota Magelang
9	Kab. Grobogan	29	Kota Pekalongan
10	Kab. Jepara	30	Kota Salatiga
11	Kab. Karanganyar	31	Kota Semarang
12	Kab. Kebumen	32	Kota Surakarta
13	Kab. Kendal	33	Kota Tegal
14	Kab. Klaten		<u>Prov. DI Yogyakarta</u>
15	Kab. Kudus	34	Kab. Bantul
16	Kab. Magelang	35	Kab. Gunung Kidul
17	Kab. Pekalongan	36	Kab. Kulon Progo
18	Kab. Pemalang	37	Kab. Sleman
19	Kab. Purbalingga	38	Kota Yogyakarta

3.2. Teknik Pengambilan Sampel

Cara pemilihan sampel akan dilakukan secara tidak random atau bersifat *purposive*. *Purposive sampling* adalah penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan yang dikehendaki oleh peneliti. Penentuan kriteria sampel diperlukan untuk menghindari *misspesifikasi* dalam penentuan sampel penelitian, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap hasil analisis, selain itu pemilihan sampel secara *purposive* ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh sampel yang representatif berdasarkan kualifikasi yang ditentukan.

Adapun kualifikasi yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah daerah yang berada di wilayah Propinsi DIY dan Jawa Tengah
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada harga konstan 2000 menurut kabupaten/kota tahun 2005-2009.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data kuantitatif yang meliputi data keuangan APBD dan realisasinya, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan Propinsi DIY dan Jawa Tengah.

3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel X (Independen)

a. Rasio Likuiditas

Kemampuan daerah dalam membayar utangnya merupakan ukuran dari ratio likuiditas, dimana dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika kemampuan daerah untuk memenuhi kewajibannya memadai maka daerah tersebut dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan fungsi pemenuhan kebutuhan perusahaannya. Rasio likuiditas diukur dengan cara :

$$\text{Rasio Likuiditas} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

b. Rasio Solvabilitas.

Rasio solvabilitas dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang (Mahmudi, 2007). Suatu daerah yang solvabel berarti bahwa daerah tersebut mempunyai

aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar utang-utangnya. Para kreditor jangka panjang atau investor selain berminat pada kondisi keuangan jangka pendek justru terutama berminat pada kondisi jangka panjang karena posisi jangka pendek betapapun baiknya tidaklah selalu parallel dengan kondisi keuangan jangka panjang. Solvabilitas menunjukkan proporsi atas penggunaan uang sebagai modal untuk membiayai aktiva perusahaan yang berasal dari modal pemilik atau modal pinjaman. Rasio solvabilitas diukur dengan cara :

$$\text{Rasio Solvabilitas} = \frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total Utang}}$$

c. Rasio Leverage

Merupakan identifikasi sumber modal daerah; pemilik atau kreditor luar. Istilah rasio *leverage* mengacu pada kenyataan bahwa menggunakan modal dengan beban bunga tetap (*fixed*) akan "memperbesar" kerugian dalam kaitannya dengan investor. Rasio yang paling banyak digunakan adalah Total Debt to Equity Ratio.

Total Debt to Equity Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Rasio ini mengindikasikan seberapa besar pemerintah daerah terbebani oleh hutang (Mahmudi, 2007). Rasio leverage diukur dengan cara :

$$\text{Rasio Leverage (TDER)} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Jumlah Ekuitas}}$$

d. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas menunjukkan seberapa efektif suatu daerah memanfaatkan sumber daya daerah. Dengan membandingkan total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah.

Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini dapat diketahui porsi belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan (Mahmudi, 2007). Rasio aktivitas ini diukur dengan cara :

$$\text{Rasio Aktivitas (Belanja Modal)} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

e. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya.

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman

daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian daerahnya (Mahmudi, 2007).

Rasio kemandirian diukur dengan cara :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer pusat} + \text{Propinsi} + \text{Pinjaman}}$$

Variabel Antesenden

f. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator untuk mengevaluasi perkembangan/kemajuan pembangunan ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu, angka pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari perubahan nilai produk domestik regional bruto (PDRB) pada harga konstan dari tahun sekarang dengan tahun sebelumnya.

Variabel Y (Dependen)

g. Pengangguran

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*) atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum bekerja (Putong, 2003).

h. Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan dari dua sisi, yaitu sisi ekonomi dan sosial. Dari sisi ekonomi yang berarti ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar, sedangkan dari sisi sosial yang berarti ketidakmampuan dalam peran sosial. Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan, baik yang relatif tetap maupun yang berkembang. Faktor relatif tetap misalnya letak geografis dan daya dukung alam. Faktor yang berkembang berupa keadaan sosial budaya yang menyangkut pengetahuan dan ketrampilan, adat istiadat, situasi politik dan kebijaksanaan penguasa. Indikator yang menyebabkan orang terperangkap kemiskinan, diantaranya perkembangan di bidang sosial dan ekonomi antara lain pelayanan kesehatan, gizi, pengajaran, perumahan, konsumsi, transportasi dan jasa, pertanian, industri dan perdagangan.

3.5. Metode Analisis Data

a. Analisis Deskriptif

Analisis ini menggunakan alat-alat seperti rata-rata, nilai maksimum, minimum dan standar deviasi. Analisis ini ditujukan untuk memberikan gambaran awal tentang rasio keuangan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan.

b. SEM (*Structural Equation Models*)

Analisis ini digunakan untuk menguji Hipotesis 1-6. Dengan alat ini dimungkinkan pengujian pengaruh simultan sebuah variabel terhadap variabel-variabel lain. Pengujian asumsi klasik diperlukan sebelum dilakukan analisis struktural ini.

(1) Evaluasi Kriteria *Goodness of Fit*

Pada langkah ini kesesuaian model dievaluasi, melalui telaah terhadap berbagai kriteria *goodness-of-fit*. Untuk itu tindakan pertama yang dilakukan adalah mengevaluasi apakah data yang digunakan dapat memenuhi asumsi-asumsi SEM. Apabila asumsi-asumsi ini dipenuhi, maka model dapat diuji.

Menurut Ferdinand (2000:48), asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang dianalisis dengan pemodelan SEM adalah:

a. Ukuran Sampel

Jumlah minimum sampel yang harus dipenuhi dalam pemodelan ini sebanyak 100 dan menggunakan perbandingan 5 observasi untuk setiap *estimated* parameter. Apabila ingin dikembangkan model dengan 20 parameter, maka minimum sampel yang harus digunakan adalah 100 sampel.

b. Normalitas dan Linearitas

Sebaran data harus dianalisis untuk melihat apakah asumsi normalitas dipenuhi, sehingga data dapat diolah lebih lanjut untuk pemodelan SEM. Normalitas dapat diuji dengan melihat gambar histogram data atau dapat diuji

dengan metode statistik. Uji normalitas perlu dilakukan, baik untuk normalitas terhadap data tunggal maupun normalitas multivariat di mana beberapa variabel digunakan sekaligus dalam analisis akhir. Uji linearitas dapat dilakukan dengan mengamati *scatterplots* data (memilih pasangan data dan melihat pola penyebarannya untuk menduga ada tidaknya linearitas).

c. *Outliers* (Nilai-nilai ekstrim)

Outliers adalah observasi yang muncul dengan nilai-nilai ekstrim, baik secara univariat maupun multivariat. Observasi tersebut muncul karena kombinasi karakteristik unik yang dimilikinya dan terlihat sangat jauh berbeda dari observasi lainnya. *Outliers* dapat diatasi asal diketahui bagaimana munculnya *outliers* itu. Pada dasarnya *outliers* dapat muncul karena:

- 1) Kesalahan prosedur, seperti kesalahan dalam memasukkan data atau memberi kode data.
- 2) Keadaan khusus yang memungkinkan profil datanya lain daripada yang lain, tetapi peneliti mempunyai penjelasan mengenai penyebab munculnya nilai ekstrim tersebut.
- 3) Adanya suatu alasan, tetapi peneliti tidak dapat mengetahui penyebabnya atau tidak ada penjelasan mengenai nilai ekstrim tersebut muncul.

Outliers dapat muncul dalam rentang nilai yang ada, namun bila dikombinasikan dengan variabel lainnya, kombinasinya menjadi tidak lazim atau sangat ekstrim (*multivariate outliers*).

d. *Multicollinearity* dapat dideteksi dari determinan matriks kovarians. Nilai determinan matriks kovarians yang sangat kecil (*extremely small*) memberi indikasi adanya masalah multikolinearitas atau singularitas. Penanganan data yang dapat dilakukan adalah dengan mengeluarkan variabel yang menyebabkan singularitas tersebut. Bila singularitas dan multikolinearitas ditemukan dalam data yang dikeluarkan itu, salah satu *treatment* yang dapat diambil adalah dengan menciptakan “*composite variables*”, untuk digunakan dalam analisis selanjutnya. Dalam analisis *SEM* tidak ada alat uji statistik tunggal untuk mengukur atau menguji hipotesis mengenai model. Umumnya terhadap berbagai jenis *fit index* yang digunakan untuk mengukur derajat kesesuaian antara model yang dihipotesiskan dengan data yang disajikan.

Kriteria untuk menerima suatu model (*data fit*) sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.1.

Tabel 3.2.
Kriteria Penerimaan Suatu Model

Goodness Of Fit Index	Cut of Value
X ² -Chi-square	Kecil
Probability	≥ 0,05
RMSEA	≤ 0,08
GFI	≥ 0,90
AGFI	≥ 0,90
CMIN/DF	≤ 2,00
TLI	≥ 0,95
CFI	≥ 0,95

Sumber: Ferdinand, 2000:59.

Uraian masing-masing dari *goodness of fit index* dapat dijelaskan sebagai berikut:

a). χ^2 – *Chi Square Statistic*

Alat uji ini merupakan alat uji paling fundamental untuk mengukur *overall fit*. Alat uji ini juga merupakan alat uji statistik mengenai adanya perbedaan antara matriks kovarians populasi dengan matriks kovarians sampel. Model yang diuji dipandang baik atau memuaskan apabila nilai *chi-square*nya rendah. Semakin kecil nilai χ^2 , semakin baik model tersebut. Dalam uji beda *chi-square*, $\chi^2 = 0$ berarti benar-benar tidak ada perbedaan dan H_0 diterima. Dengan demikian, model tersebut diterima berdasarkan probabilitas dengan *cut-off value* sebesar $p > 0,05$ atau $p > 0,10$. Dalam uji ini peneliti mencari penerimaan hipotesis nol. Nilai χ^2 yang kecil dan tidak signifikanlah yang diharapkan agar hipotesis nol sulit ditolak (H_0 diterima).

b). *The Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)*

RMSEA adalah suatu indeks yang dapat digunakan untuk mengkompensasi *chi-square statistic* dalam sampel yang besar. Nilai *RMSEA* menunjukkan *Goodness of Fit* yang dapat diharapkan bila model diestimasi dalam populasi. Nilai $RMSEA \leq 0,08$ merupakan indeks untuk dapat diterimanya model yang menunjukkan suatu *close fit* dari model tersebut berdasarkan *degrees of freedom*. Brownie dan Cudeck (1993) dalam Ferdinand (2000:53) berpendapat bahwa nilai $RMSEA \leq 0,08$ mengindikasikan adanya *reasonable error of approximation*. Para ahli tidak ingin menggunakan model dengan $RMSEA > 0,10$.

c). *Goodness of Fit Index (GFI)*

Indeks kesesuaian ini menghitung proporsi tertimbang dari varians dalam matriks kovarians sampel yang dijelaskan oleh matriks kovarians populasi yang terestimasikan. *GFI* adalah suatu ukuran non-statistikal yang mempunyai rentang nilai antara 0 (*poor fit*) hingga 1.0 (*perfect fit*). Nilai yang tinggi dalam indeks ini menunjukkan “*better fit*”.

d). *AGFI – Adjusted Goodness-of-Fit*

GFI adalah analog dari R^2 dalam regresi berganda. *Fit* indeks ini dapat disesuaikan terhadap *degrees of freedom* yang tersedia untuk menguji diterima atau tidaknya model. Tingkat penerimaan yang direkomendasikan adalah bila nilai $AGFI \geq 0,90$. *GFI* maupun *AGFI* adalah kriteria yang memperhitungkan proporsi tertimbang dari varians dalam suatu matriks kovarians sampel. Nilai 0,95 dapat diinterpretasikan sebagai tingkatan yang baik (*good overall model fit*), sedangkan nilai 0,90–0,95 menunjukkan tingkatan cukup (*adequate fit*)

e). *CMIN/DF*

The minimum sample discrepancy function (CMIN) dibagi dengan *degree of freedomnya* akan menghasilkan *indeks CMIN/DF*, yang umumnya dilaporkan oleh para peneliti sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat *fitnya* suatu model. *CMIN/DF* tidak lain adalah statistic *chi-square*, χ^2 dibagi Df-nya sehingga disebut χ^2 -relatif. Nilai χ^2 -relatif $< 2,0$ atau bahkan terkadang $< 3,0$ adalah indikasi dari *acceptable fit* antara model dan data.

f). *Tucker Lewis Index (TLI)*

TLI adalah suatu *alternative incremental fit index* yang membandingkan suatu model yang diuji terhadap suatu *baseline model*. Nilai yang direkomendasikan sebagai acuan untuk diterimanya suatu model adalah penerimaan $\geq 0,95$, dan nilai yang sangat mendekati 1 menunjukkan *a very good fit*.

g). *Comparative Fit Index (CFI)*

Besaran indeks ini adalah pada rentang nilai sebesar 0 – 1. Semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat *fit* paling tinggi (*a very good fit*). Nilai yang direkomendasikan adalah $CFI \geq 0,95$. Keunggulan dari indeks ini adalah bahwa indeks ini besarnya tidak dipengaruhi oleh ukuran sampel, karena itu sangat baik untuk mengukur tingkat penerimaan suatu model. Indeks *CFI* identik dengan *Relative Noncentrality Index (RNI)*. Dalam penilaian model, indeks *TLI* dan *CFI* sangat dianjurkan untuk digunakan karena indeks ini relatif tidak sensitif terhadap besarnya sampel dan kurang dipengaruhi pula oleh kerumitan model.

Kriteria untuk menentukan signifikansi parameter hasil estimasi dalam *SEM* dapat dilakukan dengan uji-t. Parameter tersebut meliputi:

- (a) Parameter Beta (β), yaitu parameter pengaruh (efek) variabel endogen terhadap variabel endogen lainnya.
- (b) Parameter Gamma (γ), yaitu parameter pengaruh (efek) variabel eksogen terhadap variabel endogen.

- (c) Parameter Lambda (λ), berkaitan dengan pengukuran variabel laten berdasarkan indikator pembentuknya
- (d) Parameter Delta (δ) dan Epsilon (ϵ), berkaitan dengan *error* pengukuran variabel laten eksogen dan endogen berdasarkan indikator pembentuknya
- (e) Parameter Psi (ψ), Phi (ϕ), Theta (θ). Kriteria kekuatan hubungan (pengaruh/efek) persamaan struktural (*structural equations*) dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (R^2). Makin besar R^2 atau makin mendekati 1, berarti hubungan (pengaruh/efek) persamaan struktural tersebut semakin kuat.

(2) Interpretasi dan Modifikasi Model

Langkah terakhir adalah menginterpretasikan model dan memodifikasikan model bagi model-model yang tidak memenuhi syarat pengujian yang dilakukan. Setelah model diestimasi, residualnya haruslah kecil atau mendekati nol dan distribusi frekuensi dari kovarians residual harus bersifat simetrik (Tabachnick dan Fidell dalam Ferdinand, 2000:62).

Hair *et al.* dalam Ferdinand (2000:62) memberikan sebuah pedoman untuk mempertimbangkan perlu tidaknya modifikasi sebuah model yaitu dengan melihat jumlah residual yang dihasilkan oleh model. Batas keamanan untuk jumlah residual adalah 5%. Bila jumlah residual lebih besar dari 5% dari semua residual kovarians yang dihasilkan oleh model, maka sebuah modifikasi perlu dipertimbangkan. Selanjutnya bila

ditemukan bahwa nilai residual yang dihasilkan oleh model itu cukup besar ($>2,58$), maka cara lain dalam memodifikasi adalah dengan mempertimbangkan untuk menambah sebuah alur baru terhadap model yang diestimasi itu.

Dengan penjelasan yang lebih singkat: jika model diterima, dilakukan interpretasi pola kausalitas yang dihasilkan (diestimasi), apakah secara statistik signifikan dan mengikuti teori yang mendasari. Selanjutnya bisa dilakukan modifikasi model untuk menghasilkan model alternatif (*competing models*) yang akan dibandingkan dengan model aslinya. Model yang lebih baik dipilih setelah mendapat justifikasi teoritis.



BAB IV

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Leverage, Aktivitas, dan Kemandirian terhadap Pertumbuhan Ekonomi, serta mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dan kemiskinan di propinsi Jawa Tengah dan DIY. Kinerja Data diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja modal Pemerintah DIY tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yang berupa Total APBD, Bantuan Pemerintah Pusat, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja modal (BD), Pertumbuhan Ekonomi (pertumbuhan PDRB), persentase tingkat pengangguran dan persentase penduduk miskin pada kabupaten/kota di Jateng – DIY yang diperoleh melalui publikasi lembaga resmi pemerintah, yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi DIY, selanjutnya peneliti melakukan analisis data. Selanjutnya untuk data neraca laporan keuangan pemerintah daerah diperoleh dari website <http://www.djpk.depkeu.go.id>

Dalam penelitian ini analisis statistik digunakan analisis statistik SEM (*Structural Equation Model*) dengan program AMOS.6.0.

4.1 Analisis Deskriptif

Berikut akan dijelaskan statistik deskriptif yaitu menjelaskan deskripsi data dari seluruh variabel yang akan dimasukkan dalam model penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel rasio keuangan daerah, pertumbuhan PDRB, Kemiskinan, dan pengangguran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Likuiditas	190	.5300	1132.9300	101.472579	162.4446518
Solvabilitas	190	9.10	40141.33	1958.9601	5741.36930
Leverage	190	.00003	.10997	.0047953	.01037881
Aktivitas	190	.03	.41	.1756	.06463
Kemandirian	190	.04	.36	.1130	.05909
Pertumbuhan_Ekonomi	190	1.53	7.72	4.5131	.87381
Pengangguran	190	.27	40.03	7.8737	6.26901
Kemiskinan	190	4.22	34.43	18.7170	6.87733

Sumber : Data Sekunder diolah, 2011

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan rasio likuiditas yaitu perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar memiliki rata-rata sebesar 101,47 dan standar deviasi sebesar 162,44. Hasil ini menunjukkan bahwa besarnya aktiva lancar di pemerintah daerah jauh lebih besar dibandingkan dengan hutang lancarnya dengan rata-rata adalah sebesar 101,47 kali dari nilai hutang lancarnya.

Hasil deskriptif pada rasio solvabilitas yaitu perbandingan total aktiva dengan total hutang memiliki rata-rata sebesar 1958,96 dan standar deviasi

sebesar 5741,36. Hasil ini menunjukkan bahwa besarnya total aktiva yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota se propinsi Jawa Tengah dan DIY jauh lebih besar dibandingkan dengan total hutang dengan rata-rata adalah sebesar 1958,96 kali dari nilai seluruh hutang pemerintah daerah.

Deskriptif terhadap rasio leverage memiliki rata-rata sebesar 0,00479 dan standar deviasi sebesar 0,010378. Hal ini berarti bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan hutang relatif sangat kecil yaitu hanya sebesar 0,479% dari seluruh ekuitas pemerintah daerah. Rasio leverage yang sangat rendah mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak mengalami kelebihan hutang.

Deskriptif terhadap rasio aktivitas yaitu perbandingan antara Belanja modal dengan total anggaran memiliki rata-rata sebesar 0,1756 dan standar deviasi sebesar 0,06463. Hasil ini menunjukkan bahwa besarnya belanja yang digunakan untuk pembangunan sektor publik rata-rata adalah sebesar 17,56% dari seluruh anggaran yang dibelanjakan pemerintah daerah. Sedangkan selebihnya digunakan untuk belanja pegawai atau belanja lainnya.

Hasil ilai rata-rata rasio kemandirian adalah sebesar 0,1130 dan standar deviasi sebesar 0,05909. Hal ini berarti rata-rata kemandirian pendapatan daerah yang berasal dari PAD rata-rata adalah 11,3% dari bantuan pemerintah pusat. Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata kabupaten/kota se propinsi Jawa Tengah dan DIY masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk membiayai seluruh anggaran belanjanya.

Deskriptif terhadap laju PDRB yaitu pertumbuhan ekonomi memiliki rata-rata sebesar 4,5131% dan standar deviasi sebesar 0,87381. Hasil ini berarti rata-rata pemerintah daerah kabupaten/kota se propinsi Jawa Tengah dan DIY cenderung mengalami peningkatan PDRBnya yang ditunjukkan dengan laju PDRB positif.

Deskriptif terhadap Kemiskinan yaitu memiliki rata-rata sebesar 18,717% dari seluruh total jumlah penduduk dan standar deviasi sebesar 6,87. Hasil ini berarti tingkat kemiskinan rata-rata di kabupaten/kota se propinsi Jawa Tengah dan DIY masih dalam kriteria yang rendah. Sedangkan tingkat penganggurannya rata-rata di kabupaten/kota se propinsi Jawa Tengah dan DIY adalah sebesar 7,87% dari seluruh angkatan kerja yang ada dengan standar deviasi sebesar 6,26.

4.2. Analisis Statistik

Pengujian hipotesis menggunakan analisis statistik AMOS6.0. sebelum dilakukan analisis AMOS 6.0 terlebih dahulu dilakukan uji kecocokan model (goodness of fit).

4.2.1 Uji Kebaikan Model

Untuk mengetahui kriteria model yang baik (*Goodness of Fit*) digunakan: Uji Chi Square, *Root Mean Square Error of Approximation*, Goodness of fit Index, Adjusted Goodness of fit Index dan *Tucker Lewis Index*. Uji kebaikan model ini menggunakan software Amos versi 6.0. Berikut ini *goodness of fit index* yang dihasilkan setelah pengujian :

Tabel 4.2
Goodness of Fit Index

<i>Goodness of Fit Index</i>	Hasil	<i>Cut Off Value</i>
Chi Square	16.915	Diharapkan kecil
Probability	0.110	$\geq 0,05$
RMSEA	0.071	$\leq 0,08$
GFI	0.900	$\geq 0,90$
AGFI	0.672	$\geq 0,90$
TLI	0.920	$\geq 0,90$

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2011

Nilai X^2 – Chi Square dengan tingkat signifikansi sebesar 0,110. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 yang menyatakan tidak terdapat perbedaan antara matrik kovarians sampel dengan matrik kovarians populasi yang diestimasi dapat diterima. Artinya matrik kovarians sampel dengan matriks kovarians populasi yang diestimasi adalah sama, sehingga model dinyatakan fit.

The Root Mean Square Error of Approximation – RMSEA, indeks yang digunakan untuk mengkompensasi Chi Square Statistik dalam sampel yang besar. Nilai RMSEA menunjukkan *goodnes of fit* yang dapat diharapkan bila model diestimasi dalam populasi. Nilai penerimaan yang direkomendasikan $\leq 0,08$, sementara hasil pengujian pada model adalah

sebesar $0,071 < 0,08$ sehingga modelnya adalah baik

Berdasarkan analisis terhadap *goodnes of fit* – GFI mencerminkan tingkat kesesuaian model secara keseluruhan. Tingkat penerimaan yang direkomendasikan $GFI \geq 0,90$. Hasil menunjukkan nilai GFI sebesar $0,900 \geq 0,9$, sehingga model memiliki fit yang baik.

Adjusted Goodness of fit Index – AGFI sebagai pengembangan indeks GFI, merupakan indeks yang telah disesuaikan dengan rasio degree of freedom model yang diusulkan dengan dengan degree of fredom dari null model. Hasil penelitian menunjukkan nilai AGFI sebesar 0,672 yang nilainya lebih kecil dari nilai AGFI yang direkomendasikan $> 0,9$, sehingga menunjukkan bahwa model ini memiliki fit yang marginal (mendekati).

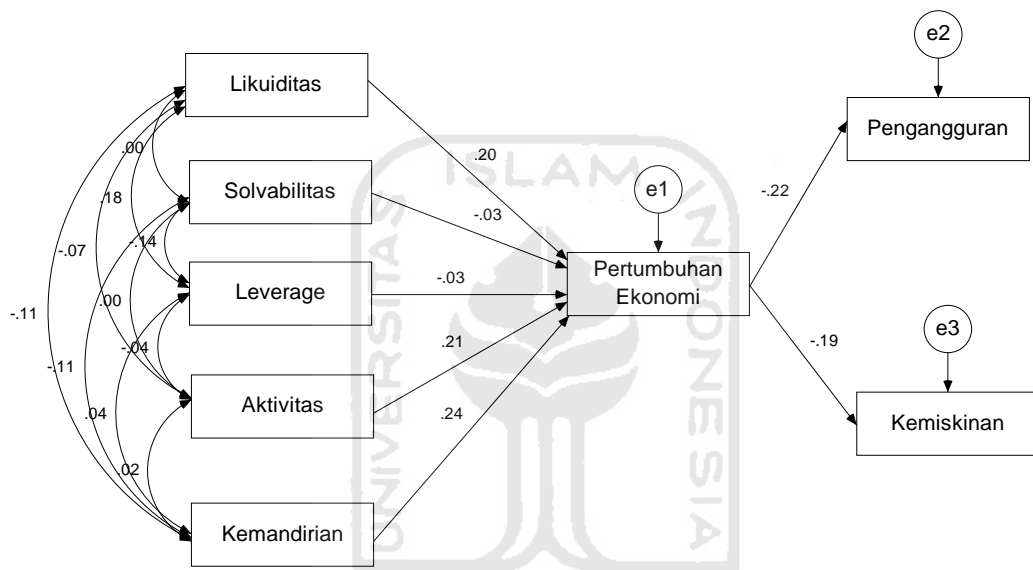
Tucker Lewis Index – TLI merupakan alternatif *incremental fit index* yang membandingkan model yang diuji dengan *baseline*. Nilai yang direkomendasikan sebagai tingkat kesesuaian yang baik adalah $\geq 0,90$. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai TLI sebesar 0,920 sehingga dapat dinyatakan bahwa tingkat kesesuaian berada pada kriteria baik

Menurut Ghozali (2005: 42) menyatakan bahwa jika satu parameter yang dihasilkan tidak mampu menjelaskan tentang kesesuaian model, maka dapat diukur dengan model fit yang lain. Dari analisis kesesuaian model tersebut menunjukkan bahwa hanya ditinjau dari nilai AGFI yang menyatakan model Jalur yang digunakan tidak baik. Sedangkan dari hasil pengujian yang lain yang ditinjau dari nilai CHI SQUARE, GFI, RMSEA, dan TLI, menunjukkan model yang baik. Dengan mengacu pada pendapat yang

dikemukakan Ghozali, maka model jalur yang diajukan dalam penelitian ini sudah memenuhi asumsi *Goodness of Fit* (Model fit yang baik)

4.2.2 Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dengan Analisis SEM diperoleh hasil jalur sebagai berikut :



Gambar 4.1. Hasil Diagram Jalur Output AMOS

Berdasarkan gambar diatas maka dapat dijelaskan hasil pengujian hipotesis pertama hingga hipotesis kelima:

Sedangkan estimasi hasil analisis SEM dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.3

Estimasi Hasil Analisis SEM

		Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Pertumbuhan_Ekonomi	← Likuiditas	.203	.000	2.909	.004	par_1
Pertumbuhan_Ekonomi	← Solvabilitas	-.034	.000	-.495	.620	par_2
Pertumbuhan_Ekonomi	← Leverage	-.031	5.885	-.445	.656	par_3
Pertumbuhan_Ekonomi	← Aktivitas	.205	.921	3.009	.003	par_4
Pertumbuhan_Ekonomi	← Kemandirian	.238	1.018	3.454	.000	par_5
Pengangguran	← Pertumbuhan_Ekonomi	-.225	.509	-3.168	.002	par_6
Kemiskinan	← Pertumbuhan_Ekonomi	-.192	.562	-2.683	.007	par_7

Sumber: Output AMOS 6.0

Dari gambar 4.1 dan tabel 4.3 maka dapat ditulis beberapa persamaan struktural yang dijadikan sebagai pedoman untuk menguji hipotesis pertama hingga hipotesis keempat.

$$PE = 0,203 \text{ Lik} - 0,034 \text{ SOL} - 0,031 \text{ LEV} + 0,205 \text{ Akt} + 0,238 \text{ Kmd} \quad (1)$$

$$\text{Pengg} = -0,225 \text{ PE} \quad (2)$$

$$\text{Kemisk} = -0,192 \text{ PE} \quad (3)$$

4.2.2.1. Pengaruh Likuiditas terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hipotesis alternatif pertama menyatakan “*Rasio Likuiditas berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi*”. Hasil pengujian dengan analisis Jalur (SEM) dapat diketahui bobot koefisien regresi terstandarisasi rasio likuiditas terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,203 dengan nilai p-value ($0,004 < 0,05$). Hal ini berarti rasio likuiditas berpengaruh secara langsung dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat didukung. Jika dilihat dari nilai bobot pengaruh langsung (standardized) yang bernilai positif menunjukkan bahwa semakin

besar rasio likuiditas maka semakin besar pula pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se propinsi Jawa Tengah dan DIY.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardi Hamzah (2008) yang menemukan bahwa secara langsung antara kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan rasio kemandirian¹, rasio kemandirian², dan rasio efisiensi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efektifitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Likuiditas berhubungan dengan masalah kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi. Suatu daerah dikatakan likuid jika daerah tersebut mempunyai kekuatan membayar sedemikian besarnya sehingga mampu memenuhi segala kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi. Dan sebaliknya, daerah yang tidak mempunyai kemampuan membayar utangnya dikatakan “illikuid”. Apabila kemampuan membayar tersebut dihubungkan dengan kewajiban pada pihak luar (kreditur) dinamakan likuiditas badan usaha, sedangkan apabila kemampuan membayar tersebut dihubungkan dengan kewajiban finansial untuk menyelenggarakan proses produksi dinamakan “likuiditas keuangan daerah” (Riyanto, 1995).

Likuiditas daerah menjadi penting karena kreditur menilai kemampuan daerah untuk mengembalikan pinjaman dari nilai likuiditas daerah. Nilai likuiditas daerah dapat dilihat pada laporan keuangan yang diungkapkan oleh daerah. Dengan kata lain pengertian likuiditas adalah sebagai perbandingan

antara jumlah uang tunai disatu pihak dengan jumlah uang lancar dilain pihak (likuiditas badan usaha), juga dengan pengeluaran-pengeluaran untuk menyelenggarakan daerah dilain pihak (likuiditas daerah). Daerah yang memiliki likuiditas tinggi akan cenderung akan cenderung memiliki realisasi anggaran yang lebih besar sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, sebaliknya daerah yang memiliki likuiditas rendah atau miskin akan cenderung mengefisiensikan jumlah anggaran belanja, sehingga pembangunan daerah menjadi terganggu.

4.2.2.2. Pengaruh Solvabilitas terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hipotesis alternatif kedua menyatakan “*Rasio solvabilitas berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi*”. Hasil pengujian dengan analisis Jalur (SEM) dapat diketahui bobot koefisien regresi terstandarisasi rasio solvabilitas terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar $-0,034$ dengan nilai p -value ($0,620 > 0,05$). Hal ini berarti rasio solvabilitas tidak berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian hipotesis kedua dalam penelitian ini **tidak dapat didukung**. Artinya besar kecilnya rasio solvabilitas pada pemerintah kabupaten/kota se propinsi Jawa Tengah dan DIY tidak akan mempengaruhi besar kecilnya pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se propinsi Jawa Tengah dan DIY.

Hal ini disebabkan karena pada pemerintah kabupaten/kota se propinsi Jawa Tengah dan DIY, merupakan pemerintah yang solvabel, dimana kemampuan asset pemerintah daerah jauh lebih besar dibandingkan dengan total hutang yaitu

berkisar antara 1958 kali (Tabel 4.1). Jika dilihat dari besarnya beban hutang pemerintah daerah baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban yang relatif sangat kecil, sehingga mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi hutangnya karena memiliki memiliki asset yang jauh lebih besar.

4.2.2.3. Pengaruh Rasio Leverage terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa “*Rasio leverage berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi*”. Hasil pengujian dengan analisis Jalur (SEM) dapat diketahui bobot koefisien regresi terstandarisasi rasio leverage terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar $-0,031$ dengan nilai p-value ($0,656 > 0,05$). Hal ini berarti rasio leverage tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian hipotesis ketiga dalam penelitian ini tidak dapat didukung. Jika dilihat dari nilai bobot pengaruh langsung (standardized) yang bernilai negatif menunjukkan bahwa semakin besar rasio leverage pada keuangan daerah maka semakin rendah pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se propinsi Jawa Tengah dan DIY, namun perubahan yang terjadi tidak mencapai nilai yang signifikan.

Tidak signifikannya variabel leverage, disebabkan karena sebagian besar pemerintah daerah di kabupaten/kota se propinsi Jawa Tengah dan DIY hanya menanggung hutang dalam kisaran yang sangat kecil yaitu berkisar antara 0,002% sampai 10,99% (Tabel 4.1), sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap alokasi anggaran, dan akhirnya kurang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.2.2.4. Pengaruh Rasio Aktivitas terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pada bab sebelumnya telah dikemukakan hipotesis alternatif keempat bahwa "*Rasio aktivitas berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi*". Hasil pengujian dengan analisis Jalur (SEM) dapat diketahui bobot koefisien regresi terstandarisasi rasio aktivitas terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,205 dengan nilai p-value ($0,003 < 0,05$). Hal ini berarti rasio aktivitas berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian hipotesis keempat dalam penelitian ini dapat didukung. Jika dilihat dari nilai bobot pengaruh langsung (standardized) yang bernilai positif menunjukkan bahwa semakin besar rasio aktivitas pada keuangan daerah maka semakin besar pula pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se propinsi Jawa Tengah dan DIY.

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja modal dari seluruh anggaran yang direalisasikan. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja modal berarti persentase belanja pembangunan yang disediakan untuk prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin meningkat. Rasio aktivitas ini menunjukkan dana yang dialokasikan untuk membeli tanah, peralatan, mesin, bangunan, jalan, irigasi dan lainnya sehingga semakin besar alokasi dana ini semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi.

4.2.2.5. Pengaruh Kemandirian terhadap pertumbuhan ekonomi

Pada bab sebelumnya telah dikemukakan hipotesis alternatif kelima bahwa "*Rasio Kemandirian Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi*". Hasil pengujian dengan analisis Jalur (SEM) dapat

diketahui bobot koefisien regresi terstandarisasi rasio kemandirian terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,238 dengan nilai p-value ($0,000 < 0,05$). Hal ini berarti rasio kemandirian berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian hipotesis kelima dalam penelitian ini dapat didukung. Jika dilihat dari nilai bobot pengaruh langsung (standardized) yang bernilai positif menunjukkan bahwa semakin besar rasio kemandirian pada keuangan daerah maka semakin besar pula pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se propinsi Jawa Tengah dan DIY.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardi Hamzah (2008) yang menemukan menemukan bukti empiris bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, berarti sumber pendapatan internal yang berasal dari PAD semakin kuat maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya. Kemandirian dan pengelolaan secara ekonomis, efektif, dan efisiensi suatu daerah atau wilayah akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dengan sumber pendapatan asli daerah yang semakin besar, menunjukkan bahwa daerah tersebut telah memiliki kemampuan dalam mengelola potensi daerah yang ada, sehingga ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin rendah, dan hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonominya.

4.2.2.6. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran

Hipotesis keenam dalam penelitian ini menyatakan bahwa "*Pertumbuhan*

ekonomi Daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran”. Hasil pengujian dengan analisis Jalur (SEM) dapat diketahui bobot koefisien regresi terstandarisasi pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran adalah sebesar -0,225 dengan nilai p-value ($0,002 < 0,05$). Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat pengangguran pada kabupaten/kota se propinsi Jawa Tengah dan DIY. Dengan demikian hipotesis keenam dalam penelitian ini dapat didukung. Jika dilihat dari nilai bobot pengaruh langsung (standardized) yang bernilai negatif menunjukkan bahwa semakin besar pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka jumlah pengangguran akan semakin rendah.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Ardi Hamzah (2008) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap jumlah pengangguran. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Okun Dalam Putong (2003) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mengurangi jumlah pengangguran. Ini menunjukkan semakin besar pertumbuhan ekonomi, maka semakin besar jumlah pengangguran. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan angka-angka makro, seperti tingkat inflasi yang terkendali, nilai tukar rupiah yang stabil, Indeks Harga Saham Gabungan (HSG) yang menguat dan lain-lain, sedangkan pada sektor riil khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi akan menyerap jumlah tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.

4.2.2.7. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan

Hipotesis ketujuh dalam penelitian ini menyatakan bahwa “*Pertumbuhan ekonomi Daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan*”. Hasil pengujian dengan analisis Jalur (SEM) dapat diketahui bobot koefisien regresi terstandarisasi pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan adalah sebesar

-0,192 dengan nilai p-value ($0,007 < 0,05$). Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota se propinsi Jawa Tengah dan DIY. Dengan demikian hipotesis ketujuh dalam penelitian ini dapat didukung. Jika dilihat dari nilai bobot pengaruh langsung (standardized) yang bernilai negatif menunjukkan bahwa semakin besar pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka jumlah kemiskinan akan semakin rendah di kabupaten/kota se propinsi Jawa Tengah dan DIY.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Ardi Hamzah (2008) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap jumlah kemiskinan.

Hal ini dikarenakan kabupaten/kota se propinsi Jawa Tengah dan DIY telah mengadakan prioritas program penanggulangan kemiskinan terutama di Jawa Tengah meliputi penciptaan perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan, peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia, peningkatan sarana prasarana sosial dasar, dan peningkatan perlindungan sosial. Hal yang sama juga ditemukan Zulfachri (<http://www.digilib.ui.ac.id/>) bahwa Peningkatan pendapatan per kapita mendorong perlambatan laju pertumbuhan kemiskinan, sebaliknya

ketidakmerataan pendapatan akan meningkatkan laju pertumbuhan penduduk miskin. Ketimpangan pendapatan mempercepat laju pertumbuhan kemiskinan, ini dapat dilihat dari pangsa pendapatan perkotaan yang berpengaruh positif terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan :

- 1) Terdapat pengaruh secara positif rasio likuiditas terhadap Pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se propinsi Jawa Tengah dan DIY.
- 2) Tidak terdapat pengaruh secara positif rasio Solvabilitas terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten/kota se propinsi Jawa Tengah dan DIY.
- 3) Tidak terdapat pengaruh secara positif rasio Leverage terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten/kota se propinsi Jawa Tengah dan DIY.
- 4) Terdapat pengaruh secara positif rasio Aktivitas terhadap Pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se propinsi Jawa Tengah dan DIY.
- 5) Terdapat pengaruh secara positif rasio kemandirian daerah terhadap Pertumbuhan ekonomi
- 6) Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran di kabupaten/kota se propinsi Jawa Tengah dan DIY.

- 7) Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan di kabupaten/kota se propinsi Jawa Tengah dan DIY

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam studi-studi selanjutnya. Obyek penelitian yang hanya terbatas pada kabupaten/kota se propinsi Jawa Tengah dan DIY, sehingga hasil kesimpulan kurang dapat digeneralisasikan untuk kabupaten/kota di propinsi lainnya

Penggunaan rasio keuangan daerah dalam penelitian ini hanya terbatas pada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio kemandirian. Sementara masih banyak rasio yang dapat digunakan untuk memprediksikan pertumbuhan ekonomi.

5.3. Saran

1. Bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah hendaknya dapat meningkatkan rasio likuiditas, kemandirian dan rasio aktivitas (belanja modal), sehingga diharapkan akan dapat menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran.
2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya mengembangkan hasil penelitian ini dengan memperluas obyek dan lokasi penelitian misalnya kabupaten/kota sepulau Jawa, dan menggunakan rasio keuangan daerah yang lain seperti rasio efektivitas dan efisiensi, derajat desentralisasi, derajat kontribusi,

rasio cakupan, rasio biaya pemungutan, rasio biaya pelayanan dan lainya
(Mahmudi, 2007)



DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito. 2005. *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*. Bapekki Depkeu.
- Adi, Priyo Hari. 2005. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota Se Jawa Bali). *Jurnal Studi Pembangunan KRITIS*. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- _____. 2006. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Se Jawa-Bali). *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang
- _____ dan Susilo, Gideon Tri Budi. 2007. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi. *Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama*. Surabaya
- Algifari. 2000. *Analisis Regresi, Teori Kasus dan Solusi*. BPFE-UGM. Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Edisi Pertama. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Asaddin, Fuad dan Mansoer, Faried Wijaya. 2001. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja: Terapan Model Kebijakan Prioritas Sektorial Untuk Kalimantan Timur. *Jurnal Riset Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi*. Vol. 1 No. 1.
- BAPPENAS. 2003. *Peta Kemampuan Keuangan Propinsi Dalam Era Otonomi Daerah : Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang dilakukan Daerah*. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- Brata, Aloysius Gunadi. 2004. Komposisi Penerimaan Sektor Publik Dan Pertumbuhan Ekonomi Regional. *Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya*. Yogyakarta.
- Bland, Lewis & Nunn, Daniel P. 2002. Some Empirical Evidence on New Regional Taxes and Charges in Indonesia. Working Paper. *Research Triangle Institute*. North Carolina.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar

- Devas, Eckhard. 1999. Germany Reforming Federal Fiscal Relation. *Organization for Economics Development*. The OECD Observer.
- Djarwanto dan Pangestu Subagyo. 1996. *Memahami Laporan Keuangan*, Edisi kedua, Penerbit Andi offset. Yogyakarta
- Ferdinand, Augusty. 2000. *Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Gaspersz, Vincent dan Esthon Foenay. 2003. Kinerja Pendapatan Ekonomi Rakyat Dan Produktivitas Tenaga Kerja Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ekonomi Rakyat*. Th. II - No. 8 - Nopember 2003.
- Ghozali, Imam. 2004. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gujarati, Damodar, N. 1999. *Basic Econometrics, International Edition*. Published by Prentice- Hall International, Inc.
- Hair, Jr., R.E. Andersen dan W.C Black. 1998. *Multivariate Data Analysis*. Prentice Hall International. New Jersey. Edisi 5
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta.
- _____. 2004. Analisis Diskripsi Pengaruh Fiskal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. *KOMPAK*. STIE YO. Yogyakarta. 127-146.
- _____ dan Syukriy Abdullah. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. *Simposium Nasional Akuntansi VI*, 1140-1159
- Hamzah, Ardi. 2008. Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi Pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Propinsi Jawa Timur Periode 2001 – 2006). *Simposium Nasional Akuntansi XI*. Pontianak
- Harianto, David dan Adi, Priyo Hari. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- Harnanto. 1984. *Analisa Laporan Keuangan, Edisi ke 1. Cetakan pertama*. BPFE-UGM. Yogyakarta.
- Husein, 2001, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Pusat Pembangunan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

- Ismerdekaningsih, Herlina & Endah Sri Rahayu. 2002. Analisis Hubungan Penerimaan Pajak Terhadap Product Domestic Bruto Di Indonesia (Studi Tahun 1985-2000). *ITB Central Library*. Bandung
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. Fiscal Decentralization and Economic Growth in China, Economic Development and Cultural Change Chicago. *Journal of Accounting*. Vol 49. Hal : 1-21.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Mahsun, Mohamad, Sulistiyowati, firma dan Andre, Heribertus P. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE-UGM. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen keuangan Daerah*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Munir, Sukmalana. 2003. *Ekonomi Mikro*. Penerbit Universitas Brawijaya
- Nanga, Muana. 2005. *Analisis Posisi Fiskal Kabupaten/Kota di NTT : Adakah Posisi Fiskal Lebih Baik*. Jurnal Studi Pembangunan KRITIS. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga
- Nyoman, Sugawa Korry. 2005. Ambiualeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. <http://www.balipost.co.id>. 21 Agustus 2010.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Propinsi Jawa Tengah dan DIY. *JAAI*. Vol. 8 No. 2, 101-118
- Putong, Iskandar. 2003. *Ekonomi Mikro dan Makro*. Edisi 2. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 58 Pasal 4 Tahun 2005 *tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*
- Santoso, S. 2002. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.

Sidik, Machfud. 2002. *Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia)*. BPF-UGM. Yogyakarta.

_____, Raksaka Mahi, Robert Simanjuntak dan Bambang Brodjonegoro. 2002. *Dana Alokasi Umum : Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.

Sugiyono, 1999, *Metode Penelitian Bisnis*, CV. Alfa Beta, Bandung.

Tambunan, Tulus. 2006. *Upaya-Upaya Meningkatkan Daya Saing Daerah*. www.kardin-indonesia.or.id. 21 Agustus 2010

Todaro, MP. 1997. *Economic Development*. Sixth Edition. Published by New York University.

Wibowo, Sri Muktiono. 2007. Dampak APBD Terhadap Perkembangan Ekonomi Lokal. *Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama*. Surabaya.

Wong, John D. 2004. The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*. Fall. 16.3. 799-816.

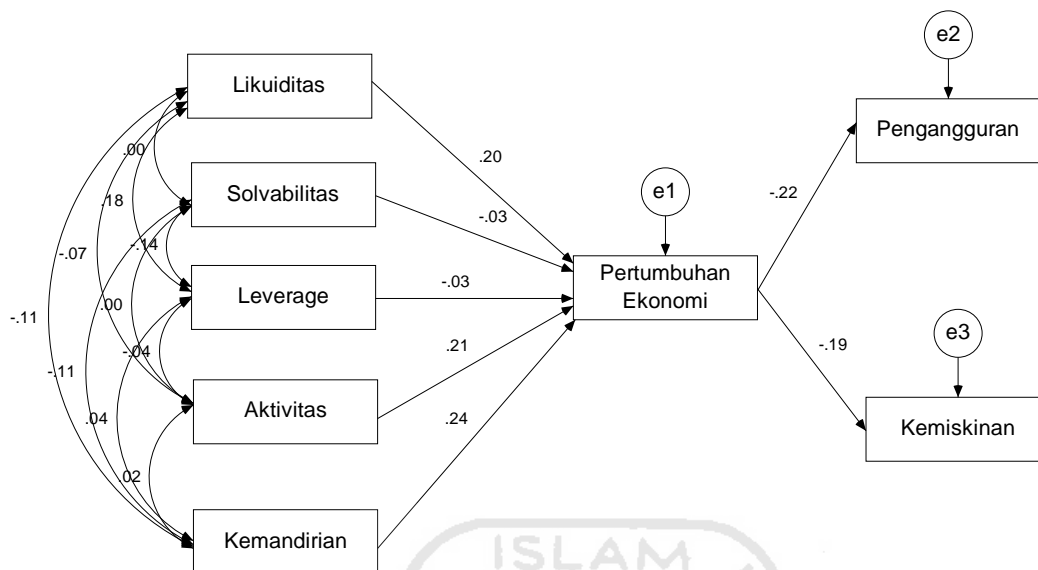
Zain, Muhammad. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cetakan Pertama. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

<http://www.djpk.depkeu.go.id>

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepercayaan	190	1.5300	1132.9300	101.472579	162.4446518
Kemampuan	190	9.10	40141.33	1958.9601	5741.36930
Perilaku	190	.00003	.10997	.0047953	.01037881
Kepercayaan	190	.03	.41	.1756	.06463
mandirian	190	.04	.36	.1130	.05909
tumbuhan_Ekonomi	190	1.53	7.72	4.5131	.87381
gangguan	190	.27	40.03	7.8737	6.26901
niskinan	190	4.22	34.43	18.7170	6.87733
Total N (listwise)	190				





Analysis Summary

Date and Time

Date: Tuesday, November 22, 2011

Time: 10:08:39 AM

Title

data amos: Tuesday, November 22, 2011 10:08 AM

Groups

Group number 1 (Group number 1)

Notes for Group (Group number 1)

The model is recursive.

Sample size = 190

Variable Summary (Group number 1)

Your model contains the following variables (Group number 1)

Observed, endogenous variables

Pertumbuhan_Ekonomi

Pengangguran

Kemiskinan

Observed, exogenous variables

Likuiditas

Solvabilitas

Leverage

Aktivitas
 Kemandirian
 Unobserved, exogenous variables
 e1
 e2
 e3

Variable counts (Group number 1)

Number of variables in your model: 1
 Number of observed variables: 8
 Number of unobserved variables: 3
 Number of exogenous variables: 8
 Number of endogenous variables: 3

Parameter summary (Group number 1)

	degrees of freedom	variances	covariances	means	intercepts	total
Fixed	3	0	0	0	0	3
Labeled	0	0	0	0	0	0
Unlabeled	7	10	8	0	0	25
Total	10	10	8	0	0	28

Assessment of normality (Group number 1)

Variable	min	max	skew	kurtosis	c.r.	skurtosis	c.r.
kemandirian	0.43	1.361	0.872	1.534	3.439	9.675	
aktivitas	0.27	1.410	0.505	0.842	0.704	1.980	
average	0.00	1.110	0.706	0.739	7.832	12.718	
kelvabilitas	0.00	141.330	0.047	0.399	6.494	14.544	
kekuiditas	0.530	132.930	0.396	0.109	4.295	0.221	
pertumbuhan_Ekonomi	0.530	7.720	0.279	0.568	1.163	3.273	
kemiskinan	0.220	34.430	0.018	0.099	-0.817	-2.297	
pengangguran	0.270	40.030	0.508	0.046	4.074	1.464	
Multivariate					3.131	11.641	

Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) (Group number 1)

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
48	111.371	0.000	0.000
161	56.820	0.000	0.000
1	51.423	0.000	0.000
157	48.938	0.000	0.000
120	47.170	0.000	0.000

observation number	lambda	chi-squared	df	p
75	34.406	00	000	
44	34.092	00	000	
62	31.852	00	000	
87	27.509	01	000	
7	23.448	03	000	
153	21.880	05	000	
39	19.659	12	000	
124	19.257	14	000	
82	19.111	14	000	
32	17.361	27	000	
182	16.480	36	002	
67	14.334	73	234	
40	13.893	35	344	
144	13.846	36	277	
70	13.826	36	209	
108	13.406	09	325	
94	13.375	00	260	
33	13.005	12	374	
69	12.386	35	566	
71	12.296	38	540	
50	11.879	57	801	
86	11.817	50	772	
118	11.365	32	911	
31	11.122	05	944	
46	11.074	08	932	
13	10.917	06	944	
74	10.660	22	971	
145	10.649	22	959	
163	10.255	48	991	
116	10.213	50	988	
68	9.801	79	998	
190	9.772	31	998	
84	9.420	08	000	
80	9.399	10	000	
183	9.262	21	000	
185	9.051	38	000	
77	8.785	51	000	
56	8.487	37	000	
110	8.345	01	000	
5	8.183	16	000	
61	8.162	18	000	

observation number	ahalanobis d-squared	p1	p2
113	8.033	30	000
21	7.941	39	000
72	7.940	39	000
24	7.765	57	000
17	7.749	58	000
49	7.679	55	000
173	7.673	56	000
30	7.614	72	000
78	7.527	31	000
109	7.442	30	000
127	7.412	33	000
114	7.296	35	000
42	7.159	20	000
122	7.152	20	000
119	7.084	28	000
152	7.069	29	000
184	6.948	42	000
15	6.890	49	000
142	6.790	59	000
169	6.600	30	000
150	6.596	31	000
23	6.511	30	000
34	6.452	37	000
65	6.397	33	000
115	6.332	10	000
66	6.266	17	000
93	6.231	21	000
3	6.134	32	000
35	6.094	37	000
156	6.050	42	000
138	5.956	52	000
146	5.955	52	000
45	5.845	55	000
52	5.821	57	000
126	5.719	79	000
178	5.702	31	000
28	5.685	32	000
11	5.605	31	000
22	5.589	33	000
20	5.494	34	000
10	5.455	38	000

Observation number	Wahlanobis d-squared	p1	p2
83	5.386	16	.000
132	5.384	16	.000
149	5.378	17	.000
181	5.371	17	.000
98	5.321	23	.000
53	5.310	24	.000
58	5.140	43	.000
36	5.051	52	.000
151	4.989	59	.000
88	4.911	57	.000
37	4.890	59	.000
63	4.880	70	.000
104	4.788	30	.000

Sample Moments (Group number 1)

Condition number = 324442989706.179

Eigenvalues

32789832.926 26249.406 45.686 37.878 .670 .004 .002 .000

Determinant of sample covariance matrix = 824608.263

Condition number = 5.029

Eigenvalues

1.810 1.368 1.241 .962 .862 .767 .631 .360

Models

Default model (Default model)

Notes for Model (Default model)

Computation of degrees of freedom (Default model)

Number of distinct sample moments: 36
Number of distinct parameters to be estimated: 25
Degrees of freedom (36 - 25): 11

Result (Default model)

Minimum was achieved

Chi-square = 16.915

Degrees of freedom = 11

Probability level = .110

Group number 1 (Group number 1 - Default model)

Estimates (Group number 1 - Default model)

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)

Maximum Likelihood Estimates

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

		Estimate	S.E.	Z	R.	P	Label
tumbuhan_Ekonomi	- kuitas	.001000	.909304				_1
tumbuhan_Ekonomi	- olvabilitas	.000000	.495520				_2
tumbuhan_Ekonomi	- erage	-2.618885	.445556				_3
tumbuhan_Ekonomi	- ktivitas	2.772921	.009303				_4
tumbuhan_Ekonomi	- emandirian	3.517018	.454***				_5
gangguan	- rtumbuhan_Ekonomi	-1.611509	.168302				_6
miskinan	- rtumbuhan_Ekonomi	-1.507562	.683307				_7

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

		Estimate
tumbuhan_Ekonomi	- kuitas	.203
tumbuhan_Ekonomi	- olvabilitas	-.034
tumbuhan_Ekonomi	- erage	-.031
tumbuhan_Ekonomi	- ktivitas	.205
tumbuhan_Ekonomi	- emandirian	.238
gangguan	- rtumbuhan_Ekonomi	-.225
miskinan	- rtumbuhan_Ekonomi	-.192

Covariances: (Group number 1 - Default model)

		Estimate	S.E.	Z	R.	P	Label
kuitas	> emandirian	-1.040	.699488	37			_8
olvabilitas	> emandirian	37.508	24.698	519	29		_9
verage	> emandirian	.000	.000	484	28		_10
ktivitas	> emandirian	.000	.000	319	50		_11
verage	> ktivitas	.000	.000	487	26		_12
olvabilitas	> erage	-8.321	4.354	911	56		_13
kuitas	> olvabilitas	80.646	483.631	015	88		_14
olvabilitas	> ktivitas	1.038	26.850	039	69		_15
kuitas	> ktivitas	-.693	.761	910	63		_16
kuitas	> erage	.305	.124	459	14		_17

Correlations: (Group number 1 - Default model)

		Estimate
kuitas	> emandirian	-.109

	Estimate
kepercayaan > kemandirian	-.111
kepercayaan > tanggung jawab	.035
kepercayaan > kemandirian	.023
kepercayaan > aktivitas	-.035
kepercayaan > tanggung jawab	-.140
kepercayaan > kepercayaannya	.001
kepercayaan > aktivitas	.003
kepercayaan > aktivitas	-.066
kepercayaan > tanggung jawab	.182

Variances: (Group number 1 - Default model)

	Estimate	S.E.	R.	P	Label
kepercayaan	26249.379	2700.245	.721	**	_18
kepercayaan	89830.282	73053.771	.721	**	_19
tanggung jawab	.000	.000	.721	**	_20
kepercayaan	.004	.000	.721	**	_21
kemandirian	.003	.000	.721	**	_22
	.663	.068	.721	**	_23
	37.122	3.819	.721	**	_24
	45.323	4.662	.721	**	_25

Minimization History (Default model)

Iteration	Negative eigenvalues	Condition #	Smallest eigenvalue	Diameter	F	Trials	Ratio
0	0	4.029		1999.000	61.582	0	1999.000
1	0	10.093		.814	16.856	1	.584
2	0	5.765		.231	97.360	1	1.169
3	0	4.049		.084	95.018	1	1.117
4	0	3.485		.019	94.916	1	1.039
5	0	3.665		.001	94.915	1	1.003
6	0	3.504		.000	94.915	1	1.000

Pairwise Parameter Comparisons (Default model)

Model Fit Summary

CMIN

Model	PAR	CMIN	F	P	MIN/DF
Default model	25	6.915	1	10	1.538

Model	PAR	CMIN	F	P	MIN/DF
Default model	36	.000	0		
Dependence model	8	13.676	8	00	5.488

RMR, GFI

Model	RMR	GFI	GFI	GFI
Default model	86.537	000	672	275
Default model	.000	000		
Dependence model	51.767	345	800	557

Baseline Comparisons

Model	NFI	FI	IFI	LI	CFI
	De	r	De	r	
	lta	h	lta	h	
	1	o	2	o	
		1		2	
Default model	.782	.72	.912	.20	.932
Default model	.000		.000		.000
Dependence model	.000	.00	.000	.00	.000

Parsimony-Adjusted Measures

Model	RATIO	NFI	CFI
Default model	.393	.150	.131
Default model	.000	.000	.000
Dependence model	1.000	.000	.000

NCP

Model	NCP	CI 90	HI 90
Default model	3.915	1.460	8.844
Default model	.000	.000	.000
Dependence model	5.676	1.489	18.381

FMIN

Model	MIN	CI 90	CI 90
Default model	502	44	.299
Default model	.000	.00	.000
Dependence model	813	55	.479

RMSEA

Model	MSEA	D 90	D 90	CLOSE
Default model	.071	.165	.239	.000
Dependence model	.154	.131	.178	.000

AIC

Model	AIC	BCC	BIC	CAIC
Default model	4.915	7.415	16.091	1.091
Truncated model	2.000	5.600	8.893	4.893
Dependence model	9.676	0.476	15.652	3.652

ECVI

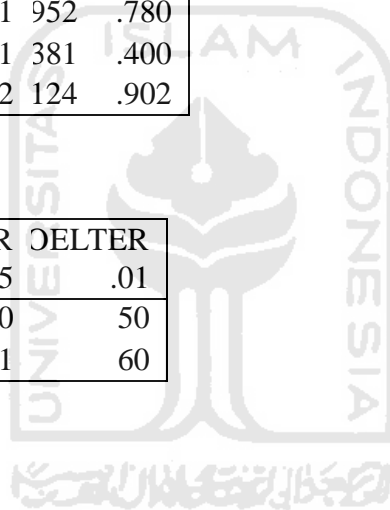
Model	ECVI	D 90	D 90	ECVI
Default model	.767	.621	.952	.780
Truncated model	.381	.381	.381	.400
Dependence model	.898	.712	.124	.902

HOELTER

Model	DELTER	DELTER
	.05	.01
Default model	40	50
Dependence model	51	60

Execution time summary

Minimization: 31
 Miscellaneous: 25
 Bootstrap: 00
 Total: 56



Data Prosentase Penduduk Miskin Kab/Kota Provinsi DIY & JATENG (%)

No	Kab/Kota	2005	2006	2007	2008	2009
1	Kab. Cilacap	22.25	24.93	22.59	21.4	19.88
2	Kab. Banyumas	22.02	24.44	22.46	22.93	21.52
3	Kab. Purbalingga	29.95	32.38	30.24	27.12	24.97
4	Kab. Banjarnegara	27.35	29.4	27.18	23.34	21.36
5	Kab. Kebumen	29.83	32.49	30.25	27.87	25.73
6	Kab. Purworejo	22.77	22.75	20.49	18.22	17.02
7	Kab. Wonosobo	31.68	34.43	32.29	27.72	25.91
8	Kab. Magelang	15.42	17.36	17.37	16.49	15.19
9	Kab. Boyolali	17.75	20	18.06	17.08	15.96
10	Kab. Klaten	22.48	22.99	22.27	21.72	19.68
11	Kab. Sukoharjo	13.67	15.63	14.02	12.13	11.51
12	Kab. Wonogiri	25.21	27.01	24.44	20.71	19.08
13	Kab. Karanganyar	16.14	18.69	17.39	15.68	14.73
14	Kab. Sragen	24.28	23.72	21.24	20.83	19.7
15	Kab. Grobogan	28	27.6	25.14	19.84	18.68
16	Kab. Blora	21.73	23.95	21.46	18.79	17.7
17	Kab. Rembang	30.72	33.2	30.71	27.21	25.86
18	Kab. Pati	19.82	22.14	19.79	17.9	15.92
19	Kab. Kudus	10.93	12.05	10.73	12.58	10.8
20	Kab. Jepara	10.39	11.75	10.44	11.05	9.6
21	Kab. Demak	23.6	26.03	23.5	21.24	19.7
22	Kab. Semarang	13.16	13.62	12.34	11.37	10.66
23	Kab. Temanggung	14.5	16.62	16.55	16.39	15.05
24	Kab. Kendal	20.06	21.59	20.7	17.87	16.02
25	Kab. Batang	18.15	19.99	20.79	18.08	16.61
26	Kab. Pekalongan	20.47	22.8	20.31	19.52	17.93
27	Kab. Pemasang	22.59	25.3	22.79	23.92	22.17
28	Kab. Tegal	19.6	20.71	18.5	15.78	13.98
29	Kab. Brebes	27.79	30.36	27.93	25.98	24.39
30	Kota Magelang	12.94	11.19	10.01	11.16	10.11
31	Kota Surakarta	13.34	15.21	13.64	16.13	14.99
32	Kota Salatiga	8.81	8.9	9.01	8.47	7.82
33	Kota Semarang	4.22	5.33	5.26	6	4.84
34	Kota Pekalongan	6.37	7.38	6.62	10.29	8.56
35	Kota Tegal	8.96	10.4	9.36	11.28	9.88
1	Kab. Kolon Progo	26.8	28.39	28.61	26.85	24.65
2	Kab. Bantul	18.21	20.25	19.43	18.54	17.64
3	Kab. Gunung Kidul	27.29	28.45	28.9	25.96	24.44
4	Kab. Sleman	14.06	12.7	12.56	12.34	11.45
5	Kota Yogyakarta	10.5	10.22	9.78	10.81	10.05

Data Prosentase Pengangguran Kab/Kota Provinsi DIY & JATENG (%)

No	Kab/Kota	2005	2006	2007	2008	2009
1	Kab. Cilacap	17.62	23.02	7.36	3.61	3.24
2	Kab. Banyumas	15.43	17.32	5.37	3.56	1.18
3	Kab. Purbalingga	8.85	10.94	1.97	0.27	4.35
4	Kab. Banjarnegara	10.52	13.96	5.39	1.76	1.66
5	Kab. Kebumen	15.26	19.98	2.97	3.68	3.31
6	Kab. Purworejo	6	40.03	2.25	1.64	3.34
7	Kab. Wonosobo	6.8	6.41	1.66	1.12	1.71
8	Kab. Magelang	9.4	10.36	1.66	5.25	1.75
9	Kab. Boyolali	6.53	9.9	2.79	2.77	1.96
10	Kab. Klaten	7.92	13.84	5.29	4.36	3.71
11	Kab. Sukoharjo	14.04	13.42	7.14	0.79	2
12	Kab. Wonogiri	12.35	8.03	2.76	0.65	2.85
13	Kab. Karanganyar	6.25	10.78	1.21	1.63	8.66
14	Kab. Sragen	13.46	9.41	1.6	0.36	5.09
15	Kab. Grobogan	5.12	11.89	5.38	1.33	7.37
16	Kab. Blora	4.91	7.25	2.64	1.88	3.81
17	Kab. Rembang	10.44	14.26	3.8	1.41	3.59
18	Kab. Pati	9.57	10.89	8.47	8.2	2.51
19	Kab. Kudus	13.95	8.41	3.91	7.69	2.07
20	Kab. Jepara	15.46	13.22	1.59	3.66	1.93
21	Kab. Demak	13.97	13.45	4.71	8.19	2.28
22	Kab. Semarang	8.02	12.7	2.83	1.83	5.02
23	Kab. Temanggung	6.71	6.38	2.16	1.2	3.98
24	Kab. Kendal	8.23	13.45	2.16	5.08	3.98
25	Kab. Batang	11.25	11.89	5.09	3.3	7.33
26	Kab. Pekalongan	10.66	16.06	4.52	0.94	1.38
27	Kab. Pemalang	12.14	17.57	1.41	7.27	5.49
28	Kab. Tegal	12.02	11.61	5.38	6.09	7.07
29	Kab. Brebes	12.92	12.31	4.51	7.3	9.81
30	Kota Magelang	29.9	19.83	4.82	6.66	4.1
31	Kota Surakarta	12.37	22.78	7.69	7.77	6.66
32	Kota Salatiga	27.03	25.11	7.92	9.59	10.47
33	Kota Semarang	18.83	32.98	11.79	11.47	10.25
34	Kota Pekalongan	17.47	19.74	8.92	11.21	11.58
35	Kota Tegal	16.1	20.72	14.29	6.37	9.59
1	Kab. Kolon Progo	7.31	14.33	1.67	2.93	2.22
2	Kab. Bantul	11.97	12.55	5	4.15	3.01
3	Kab. Gunung Kidul	4.07	4.42	2.3	1.31	4.06
4	Kab. Sleman	9.21	11.37	2.99	2.16	4.29
5	Kota Yogyakarta	13.41	17.54	5.88	3.53	3.43

Data Laju Pertumbuhan PDRB Kab/Kota Provinsi DIY & JATENG (%)

No	Kab/Kota	2005	2006	2007	2008	2009
1	Kab. Cilacap	7.72	5.11	2.64	6.07	1.53
2	Kab. Banyumas	3.21	4.48	5.30	5.41	5.49
3	Kab. Purbalingga	4.18	5.06	6.19	6.52	5.61
4	Kab. Banjarnegara	3.95	4.35	5.01	5.25	5.11
5	Kab. Kebumen	3.20	4.08	4.52	5.61	3.94
6	Kab. Purworejo	4.85	5.23	6.08	5.44	4.96
7	Kab. Wonosobo	3.19	3.23	3.58	3.77	3.85
8	Kab. Magelang	4.62	4.91	5.21	4.99	4.72
9	Kab. Boyolali	4.08	4.19	4.08	4.04	5.16
10	Kab. Klaten	4.59	2.30	3.31	4.02	4.24
11	Kab. Sukoharjo	4.11	4.53	5.11	4.84	4.76
12	Kab. Wonogiri	4.31	4.07	5.07	5.61	4.73
13	Kab. Karanganyar	5.49	5.08	5.74	4.64	3.59
14	Kab. Sragen	5.16	5.18	5.73	5.91	6.01
15	Kab. Grobogan	4.74	4.00	4.37	4.88	5.03
16	Kab. Blora	4.32	4.15	4.46	4.64	4.97
17	Kab. Rembang	3.56	5.53	3.81	3.70	4.46
18	Kab. Pati	3.94	4.45	5.19	5.69	4.69
19	Kab. Kudus	4.40	2.48	3.23	3.01	3.78
20	Kab. Jepara	4.23	4.19	4.74	5.26	5.02
21	Kab. Demak	3.86	4.20	4.15	4.70	4.08
22	Kab. Semarang	3.11	3.81	4.72	4.56	4.37
23	Kab. Temanggung	3.99	3.31	4.03	4.20	4.09
24	Kab. Kendal	2.63	3.66	4.28	4.12	4.10
25	Kab. Batang	2.80	2.51	3.49	3.32	3.72
26	Kab. Pekalongan	3.98	4.21	4.59	4.12	4.30
27	Kab. Pemasang	4.05	3.72	4.47	4.83	4.78
28	Kab. Tegal	4.72	5.19	5.51	5.32	5.49
29	Kab. Brebes	4.80	4.71	4.79	4.81	4.99
30	Kota Magelang	4.33	2.44	5.17	4.99	5.11
31	Kota Surakarta	5.15	5.43	5.82	5.69	5.90
32	Kota Salatiga	4.15	4.17	5.39	5.55	4.48
33	Kota Semarang	5.14	5.71	5.98	5.19	4.70
34	Kota Pekalongan	3.82	3.06	3.80	3.72	4.18
35	Kota Tegal	4.87	5.15	5.21	5.39	5.04
1	Kab. Kolon Progo	4.77	4.05	4.12	4.71	3.97
2	Kab. Bantul	4.99	2.02	4.52	4.90	4.86
3	Kab. Gunung Kidul	4.33	3.82	3.91	4.39	4.20
4	Kab. Sleman	5.03	4.50	4.61	5.13	4.22
5	Kota Yogyakarta	4.83	3.97	4.46	5.12	5.56

RASIO LIKUIDITAS

No	Kabupaten/Kota	Aktiva Lancar					Hutang Lancar					Rasio Likuiditas				
		2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
1	Kab. Cilacap	81,409	151,157	184,912	129,216	211,858	1,824	5,646	8,383	15,089	8,003	50,13	28,77	22,06	8,56	28,46
2	Kab. Banyumas	74,429	164,001	74,430	162,005	144,243	5,237	5,046	5,236	14,376	10,161	14,21	32,49	14,21	11,30	14,20
3	Kab. Purworejo	78,614	95,795	81,899	95,617	78,265	13,115	1,428	1,493	12,896	15,176	5,99	67,10	54,86	7,43	5,16
4	Kab. Banjarnegara	88,154	110,186	98,623	86,594	84,326	1,512	1,271	1,646	207	193	58,30	86,66	60,09	418,67	435,34
5	Kab. Kebumaha	101,710	133,937	101,254	142,022	74,046	238	1,745	1,651	1,901	201	427,35	76,72	61,33	74,71	363,58
6	Kab. Purworejo	51,242	96,987	61,480	102,944	95,096	1,211	695	1,573	1,693	1,757	42,31	138,61	38,08	60,82	94,09
7	Kab. Wonorejo	39,275	77,678	64,378	54,653	63,625	4,334	15,225	4,334	4,869	0,84	17,92	17,92	4,23	12,61	13,16
8	Kab. Magelang	118,577	135,860	121,447	129,606	154,115	1,056	2,742	1,612	1,384	1,310	112,29	49,55	75,36	93,63	117,67
9	Kab. Boyolali	50,636	110,148	153,254	82,527	96,986	357	5,213	258	148	85	141,84	21,18	593,36	558,60	1132,93
10	Kab. Klaten	65,587	74,972	83,574	47,864	48,119	7,751	169	8,341	3,138	3,233	8,59	443,60	10,02	15,25	14,88
11	Kab. Sukoharjo	73,782	98,654	131,112	65,821	86,337	3,19	246	357	226	168	231,29	400,54	367,09	291,16	513,81
12	Kab. Wonorejo	99,874	179,955	105,819	168,786	45,460	666	1,584	874	2,600	30,113	148,96	113,58	121,12	64,93	1,51
13	Kab. Karanganyar	77,254	98,870	89,890	115,822	84,914	2,051	2,053	5,031	10,835	7,795	37,67	48,16	17,87	10,89	10,89
14	Kab. Sragen	60,257	92,243	71,820	85,059	67,067	2,336	6,339	2,673	3,873	1,080	24,74	14,55	28,87	21,96	62,08
15	Kab. Grobogan	45,167	68,347	55,887	77,993	69,692	20,458	45,875	23,554	66,750	42,453	2,21	1,49	2,38	1,17	1,84
16	Kab. Bura	133,279	242,181	163,533	178,983	89,111	1,354	11,917	149	1,720	849	98,43	20,32	1033,62	157,98	104,99
17	Kab. Rembang	31,587	60,254	39,871	46,322	44,091	13,115	10,257	13,541	18,361	141	2,41	5,87	2,94	2,52	312,35
18	Kab. Pati	12,578	203,356	170,906	180,044	158,419	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Kab. Kudus	22,574	61,042	28,610	106,303	158,235	42,587	605	361,888	2,083	3,658	0,53	100,65	0,80	51,54	37,45
20	Kab. Jepara	38,546	52,719	41,190	62,207	71,605	1,025	1,526	1,328	3,597	6,005	37,61	34,54	31,03	17,29	11,95
21	Kab. Demak	45,887	82,209	65,668	81,359	65,201	9,15	2,407	875	1,034	528	48,93	34,16	74,90	78,89	123,50
22	Kab. Semarang	104,655	121,826	117,449	73,380	66,582	1,324	2,573	1,209	952	3,885	79,04	47,34	98,93	77,12	17,13
23	Kab. Tembung	9,845	103,468	76,366	61,295	82,511	1,112	4,407	2,722	2,612	4,030	87,90	23,48	28,05	23,47	20,48
24	Kab. Kendal	69,254	79,304	73,873	80,295	66,221	651	321	1,896	365	363	108,38	247,02	34,16	219,97	182,67
25	Kab. Batang	40,233	725,294	703,781	79,621	65,673	1,659	128,567	5,213	1,017	1,282	37,99	5,64	135,02	78,29	51,22
26	Kab. Pekalongan	88,659	119,156	94,103	102,287	80,873	1,589	1,160	2,043	1,634	4,077	55,80	103,64	46,06	62,59	19,83
27	Kab. Pemalang	115,802	112,364	118,670	54,981	63,405	754	1,035	540	-211	3,952	153,72	108,59	219,61	780,17	16,04
28	Kab. Brebes	54,360	75,856	87,793	92,995	56,880	629	2,594	1,984	2,307	2,121	86,42	29,25	44,26	40,32	26,82
30	Kab. Magelang	29,566	127,459	130,238	194,970	149,943	1,091	8,152	7,575	8,592	9,950	27,10	16,84	17,20	15,71	16,07
31	Kab. Surakarta	22,888	121,826	117,149	56,466	32,835	5,115	2,573	1,209	5,606	29,906	4,44	47,34	98,93	10,07	1,10
32	Kab. Salatiga	37,631	118,956	78,938	137,345	72,840	505	2,088	1,186	2,370	3,058	74,52	56,98	66,57	57,86	23,82
33	Kab. Semarang	277,892	325,009	281,989	335,394	405,328	1,100	2,745	4,108	5,250	11,315	252,60	118,38	68,64	63,88	35,82
34	Kab. Pekalongan	99,546	72,526	70,378	208,754	166,642	3,514	3,625	3,635	5,590	41,05	20,84	19,41	57,43	29,81	
35	Kab. Tegal	218,613	215,226	202,659	245,254	233,159	385	1,687	3,404	2,485	1,987	598,94	128,13	59,53	98,69	117,34
36	Kab. Kulon Progo	45,166	64,146	51,993	38,005	38,684	547	1,254	1,035	4,787	4,432	82,57	51,15	50,25	7,94	13,24
37	Kab. Bantul	51,133	144,657	107,369	101,332	75,407	4,428	3,280	3,370	4,622	3,23	11,55	44,11	31,86	21,92	232,15
38	Kab. Gunung Kidul	41,367	86,758	56,282	52,400	71,817	143	138	150	135	582	270,37	630,28	375,31	388,04	123,45
39	Kab. Sleman	70,032	225,365	163,539	241,872	191,255	4,974	7,060	3,690	3,620	3,432	14,08	31,92	44,31	66,81	55,73
40	Kab. Yogyakarta	28,104	149,393	104,000	161,226	121,584	1,764	2,353	2,283	3,624	2,955	15,93	63,50	45,66	44,48	41,01

RASIO SOLVABILITAS

No	Kabupaten/kota	Total Aktiva					Total Hutang					Rasio Solvabilitas				
		2005	2006	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009		
1	Kab. Cilacap	1.949.951	2.301.442	2.593.645	2.836.653	3.089.806	2.317	2.07	6.368	193	193	841.58	11130.91	407.31	14678.13	15983.06
2	Kab. Banyumas	1.869.685	2.482.831	3.517.979	2.892.171	3.030.808	6.118	14.776	4.370	10.161	10.161	305.60	172.71	804.94	264.95	298.27
3	Kab. Purbalingga	1.064.578	1.051.217	1.194.392	1.396.624	1.497.624	2.115	1.862	2.094	1.576	1.576	503.35	564.49	570.33	866.07	950.16
4	Kab. Banjarnegara	2.115.074	2.174.651	2.390.802	3.475.914	3.546.330	1.524	1.589	1.646	1.376	1.376	1387.84	1368.37	1462.32	2525.18	2576.34
5	Kab. Kebumpe	12.423.319	13.592.400	11.655.874	12.996.368	13.040.844	1.036	432	445	328	328	11991.62	31424.31	26192.98	39639.46	40141.33
6	Kab. Purworejo	787.224	832.350	989.239	995.809	1.321.875	1.365	9.259	1.468	9.990	9.990	580.96	88.89	673.88	99.66	132.32
7	Kab. Wonorejo	1.464.879	1.613.272	1.753.639	1.544.524	1.684.352	46.880	15.665	4.334	10.211	10.211	10.211	31.67	102.99	404.61	151.27
8	Kab. Magelang	1.394.904	1.394.282	1.483.770	1.593.097	1.737.946	2.411	1.034	3.489	528	528	561.97	1309.80	425.30	3017.62	3291.99
9	Kab. Boyolali	701.580	880.437	1.015.400	1.152.244	1.289.824	772	96.756	5.541	71.230	71.230	908.78	9.10	183.25	24.60	17.83
10	Kab. Klaman	4.826.774	4.978.276	5.119.306	5.295.724	5.728.644	11.245	3.897	169	6.006	6.006	429.24	1383.35	30290.53	881.78	953.85
11	Kab. Sukoharjo	663.726	801.928	905.093	972.763	1.164.687	1.723	26.073	1.272	17.198	17.198	395.22	30.06	711.82	56.76	67.96
12	Kab. Wonogiri	2.156.889	2.188.326	2.371.158	2.469.820	1.739.811	666	1.901	25.544	201	201	3238.57	1151.21	92.83	12293.60	8660.46
13	Kab. Karanganyar	4.215.894	2.089.742	4.824.802	4.894.028	5.072.828	2.954	3.875	3.048	5.337	5.337	1427.18	539.29	1582.72	935.79	950.55
14	Kab. Sragen	1.234.567	1.258.392	1.474.108	1.535.883	1.639.278	3.015	3.138	6.339	3.264	3.264	409.47	400.37	232.66	472.09	600.70
15	Kab. Grobogan	905.644	1.567.785	1.311.954	1.422.162	1.503.450	20.488	2.742	4.483	4.483	4.483	44.27	571.88	290.77	317.25	335.39
16	Kab. Bura	2.056.498	2.431.954	2.631.558	2.755.111	1.335.028	1.354	1.984	12.518	1.310	1.310	1518.83	1756.83	210.22	2103.57	1019.31
17	Kab. Rembang	649.554	819.580	779.546	869.192	924.266	4.551	0	3.546	0	0	142.73	0.00	219.84	0.00	0.00
18	Kab. Pati	859.003	795.912	985.933	1.159.913	1.283.997	0	2.812	0	2.737	2.737	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Kab. Kudus	1.423.640	1.485.965	1.525.652	1.679.179	1.959.844	2.214	6.135	1.660	7.642	7.642	643.02	242.22	820.26	219.74	256.47
20	Kab. Jepara	3.422.157	3.903.396	4.087.047	4.267.542	4.422.323	1.564	13.444	1.528	15.612	15.612	2188.08	290.34	267.61	273.35	283.26
21	Kab. Demak	842.657	796.476	996.709	1.171.831	1.300.808	1.738	2.410	2.407	2.365	2.365	479.33	330.47	409.76	495.57	590.11
22	Kab. Semarang	1.563.248	1.502.435	1.704.876	1.813.221	1.950.458	2.745	18.847	2.748	534	534	569.49	79.72	620.39	3395.65	3662.66
23	Kab. Tembung	1.566.498	1.566.862	1.770.163	1.946.028	2.584.846	3.410	1.066	4.305	4.001	4.001	488.71	1429.84	411.19	461.10	645.99
24	Kab. Kendal	1.736.485	1.814.880	1.980.333	2.289.991	2.788.427	6.126	3.073	6.346	1.080	1.080	339.83	468.53	312.05	2119.56	2990.16
25	Kab. Batang	1.298.025	1.319.982	1.433.758	1.555.579	1.644.135	2.516	1.079	859	859	859	515.91	1223.57	675.93	1810.37	1913.44
26	Kab. Pekalongan	3.366.812	3.482.713	3.588.580	3.746.417	1.802.119	2.946	908	3.444	4.859	4.859	1149.63	3841.80	1042.10	771.10	370.92
27	Kab. Pemalang	1.935.782	1.839.778	2.024.580	1.900.823	1.947.778	4.465	5.429	6.538	28.152	28.152	433.55	338.65	305.00	67.52	68.19
28	Kab. Tegal	1.295.487	1.148.756	1.333.346	1.458.143	1.584.532	2.864	27.751	2.64	30.113	30.113	452.33	41.39	641.11	48.42	53.42
29	Kab. Brebes	794.612	1.534.419	1.324.571	1.414.591	1.584.730	3.185	4.334	3.934	4.659	4.659	249.49	354.05	336.70	291.13	326.14
30	Kab. Magelang	1.222.430	1.326.239	1.463.973	1.536.557	1.689.770	629	2.207	2.594	4.019	4.019	1943.45	575.00	564.42	382.32	423.45
31	Kab. Sukoharjo	2.597.240	2.147.752	3.330.437	3.490.440	6.166.783	23.899	2.370	31.755	3.098	3.098	109.60	1158.62	104.88	1141.34	2016.48
32	Kab. Sragen	841.603	946.766	1.065.199	1.274.953	1.348.181	924	17.339	2.088	20.530	20.530	910.83	54.60	510.21	62.10	65.67
33	Kab. Semarang	4.167.895	4.208.182	4.488.394	5.438.328	5.129.077	15.872	25.544	20.206	46.706	46.706	262.59	165.96	222.13	116.43	108.61
34	Kab. Pekalongan	3.366.812	3.588.579	3.492.712	4.125.694	4.695.124	2.946	7.006	3.068	8.323	8.323	1148.63	572.24	1139.18	465.72	564.15
35	Kab. Tegal	1.270.952	1.252.406	1.369.170	1.435.445	1.524.460	3.657	4.111	5.719	3.172	3.172	336.60	304.67	239.40	452.60	480.67
36	Kab. Klaman Progo	669.644	735.983	860.400	1.067.433	1.288.888	1.869	5.387	2.225	929	929	489.15	136.61	386.64	1148.45	1366.38
37	Kab. Bantul	1.289.649	1.499.937	1.743.551	603.675	3.076.315	5.301	774	4.239	1.099	1.099	218.55	1938.83	411.33	458.13	3380.29
38	Kab. Gunung Kidul	716.320	768.583	917.396	2.094.209	2.184.944	1.202	5.829	905	5.115	5.115	528.22	136.53	1013.20	403.56	427.04
39	Kab. Sleman	1.718.660	1.918.875	2.106.904	966.614	939.888	6.075	4.804	8.476	4.399	4.399	282.56	399.44	248.57	219.72	213.64
40	Kab. Yogyakarta	2.135.353	2.229.901	2.425.459	2.380.548	2.578.555	7.575	5.647	6.823	8.155	8.155	281.88	394.71	355.46	291.88	316.13

RASIO AKTIVITAS

No	Kebupaten/Kota	BELANJA MODAL								TOTAL APBD								Rasio Aktifitas							
		2005	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009							
1	Kab. Cirebon	72.907	226.108	202.779	207.861	120.861	556.223	922.777	862.162	1.011.610	1.092.960	0.129	0.242	0.238	0.206	0.111									
2	Kab. Banyumas	59.631	122.919	111.772	145.456	184.009	566.165	801.766	816.720	902.466	994.246	0.105	0.153	0.161	0.185										
3	Kab. Purbalingga	38.163	89.778	179.944	134.878	514.031	565.649	668.147	688.147	688.147	688.147	0.102	0.175	0.184	0.269	0.186									
4	Kab. Banjarnegara	59.073	109.443	128.008	125.150	102.464	380.294	552.710	580.056	1.224.192	685.505	0.155	0.198	0.220	0.102	0.149									
5	Kab. Kebumaha	41.117	100.048	242.725	183.040	174.922	479.931	713.768	735.291	818.930	863.968	0.086	0.141	0.330	0.224	0.202									
6	Kab. Purworejo	32.664	52.689	109.596	108.151	93.300	366.380	541.554	600.955	674.176	712.655	0.085	0.097	0.181	0.160	0.131									
7	Kab. Wonorejo	22.200	112.715	126.456	147.117	132.166	192.089	400.201	510.043	565.157	610.452	0.116	0.230	0.186	0.155	0.142									
8	Kab. Magelang	48.151	157.427	134.825	121.991	117.794	457.928	663.996	727.761	788.734	830.159	0.105	0.237	0.186	0.155	0.142									
9	Kab. Boyolali	57.415	74.010	111.554	131.178	136.725	439.245	630.260	662.226	745.178	820.831	0.131	0.117	0.171	0.176	0.167									
10	Kab. Klaten	31.049	83.846	148.776	149.662	108.823	539.739	780.141	846.331	946.524	965.238	0.059	0.110	0.176	0.158	0.114									
11	Kab. Sukoharjo	31.153	75.652	96.790	116.553	92.437	300.338	549.271	664.131	664.287	683.939	0.082	0.138	0.138	0.170	0.133									
12	Kab. Wonogiri	72.702	154.512	94.500	126.328	130.188	331.059	666.394	706.765	777.434	826.254	0.220	0.235	0.135	0.162	0.158									
13	Kab. Karanganyar	63.466	79.251	103.094	128.789	100.289	391.631	546.611	602.775	715.880	719.200	0.162	0.145	0.171	0.180	0.139									
14	Kab. Sragen	57.186	113.623	166.502	162.722	120.207	411.992	617.932	698.897	767.045	749.811	0.139	0.184	0.225	0.199	0.160									
15	Kab. Grobogan	70.326	80.696	153.407	146.123	116.560	457.888	639.046	695.840	756.884	779.646	0.154	0.126	0.220	0.193	0.150									
16	Kab. Bora	31.474	56.394	131.864	168.503	130.076	389.932	539.470	611.149	704.762	714.058	0.081	0.108	0.216	0.225	0.182									
17	Kab. Rembang	15.858	56.877	150.367	128.993	88.623	306.735	485.956	508.456	576.005	585.125	0.082	0.117	0.287	0.220	0.151									
18	Kab. Pati	51.861	78.088	172.432	209.607	156.704	491.194	681.389	746.342	845.816	898.471	0.106	0.116	0.231	0.248	0.181									
19	Kab. Kudus	104.826	66.295	118.243	150.514	228.939	388.152	526.935	668.482	724.228	822.456	0.270	0.126	0.177	0.208	0.278									
20	Kab. Jepara	56.660	121.063	134.727	157.838	128.009	411.000	562.502	657.116	717.328	772.922	0.138	0.215	0.205	0.220	0.166									
21	Kab. Demak	22.728	36.437	155.229	108.998	171.127	369.800	525.152	589.032	662.982	682.660	0.082	0.069	0.264	0.165	0.251									
22	Kab. Semarang	32.436	133.256	146.546	162.814	124.183	410.314	528.965	634.342	712.446	745.450	0.079	0.252	0.229	0.229	0.167									
23	Kab. Tembungung	21.025	77.193	112.791	123.175	88.563	162.814	228.939	388.152	480.948	551.363	0.137	0.169	0.224	0.218	0.153									
24	Kab. Kendal	70.715	175.511	132.584	114.676	96.243	390.285	576.117	616.671	678.571	699.808	0.181	0.305	0.215	0.164	0.131									
25	Kab. Batang	42.057	63.852	115.671	127.674	94.659	306.380	441.187	480.948	551.363	573.555	0.137	0.145	0.241	0.232	0.165									
26	Kab. Pekalongan	37.682	50.948	65.199	87.857	102.120	342.619	475.316	528.701	641.446	654.708	0.110	0.107	0.120	0.137	0.156									
27	Kab. Pemalang	31.938	115.895	156.656	113.400	81.243	433.129	639.447	638.456	666.618	711.612	0.074	0.182	0.249	0.163	0.114									
28	Kab. Tegal	72.208	149.519	160.678	192.400	171.083	467.664	656.888	680.038	775.620	825.553	0.154	0.227	0.237	0.248	0.207									
29	Kab. Brebes	63.105	118.285	190.844	214.364	165.544	512.166	763.221	771.139	864.249	965.616	0.123	0.155	0.246	0.248	0.171									
30	Kab. Magelang	29.880	49.954	69.556	117.475	95.539	192.502	290.801	310.486	351.486	375.118	0.155	0.172	0.224	0.334	0.255									
31	Kab. Surakarta	10.175	63.883	152.340	166.977	180.399	373.630	510.880	590.132	688.976	772.784	0.027	0.125	0.258	0.243	0.246									
32	Kab. Salatiga	35.316	54.435	63.287	144.402	142.757	191.364	272.683	290.071	376.397	348.178	0.185	0.200	0.218	0.394	0.410									
33	Kab. Semarang	32.978	90.437	193.077	164.274	274.530	790.214	1.055.717	1.082.928	1.180.983	1.369.671	0.042	0.086	0.178	0.139	0.200									
34	Kab. Pekalongan	44.587	57.223	69.577	77.494	70.555	151.364	283.928	314.336	368.906	377.279	0.256	0.202	0.221	0.210	0.187									
35	Kab. Tegal	50.129	76.629	103.533	90.575	128.880	261.569	305.664	333.003	372.947	390.650	0.192	0.260	0.311	0.243	0.330									
36	Kab. Kulon Progo	12.964	96.102	88.391	74.301	74.301	307.911	448.372	498.643	534.647	575.115	0.042	0.166	0.197	0.165	0.129									
37	Kab. Bantul	34.174	65.603	95.734	297.886	123.430	442.292	599.620	676.930	696.532	829.475	0.077	0.109	0.141	0.311	0.149									
38	Kab. Gunung Kidul	30.773	115.105	108.710	78.216	98.742	312.289	527.352	650.665	709.502	850.627	0.086	0.218	0.190	0.203	0.139									
39	Kab. Sleman	73.588	75.308	81.308	136.069	109.127	620.930	702.930	571.732	835.916	909.361	0.141	0.107	0.142	0.091	0.120									
40	Kab. Yogyakarta	70.188	79.402	81.308	97.072	98.302	391.887	519.022	571.732	679.624	703.867	0.179	0.153	0.142	0.143	0.140									

